

**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA
KEPEMIMPINAN SUPARTI SEBAGAI KEPALA DESA
NGLEBAK KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN
KARANGANYAR**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Laili Hero Alfauziah

1906016091

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Laili Hero Alfauziah

NIM : 1906016091

Jurusan : Ilmu Politik

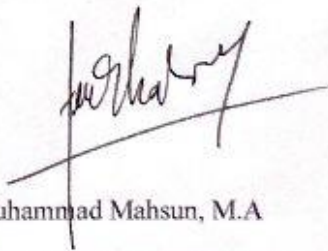
Judul Skripsi : Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kepemimpinan Suparti Sebagai Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Maret 2023

Pembimbing,



Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 198511182016011901

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA KEPEMIMPINAN
SUPARTI SEBAGAI KEPALA DESA NGLEBAK KECAMATAN
TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Disusun Oleh:
Laili Hero Alfauziah
1906016091

Telah Dipertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi
pada tanggal 5 April 2023 dan telah dinyatakan lulus

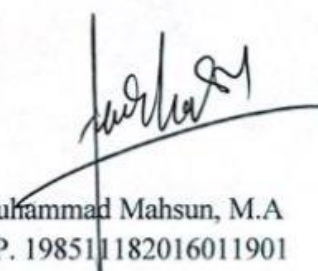
Susunan Dewan Penguji

Ketua

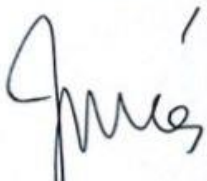


Drs. H. H. Shatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

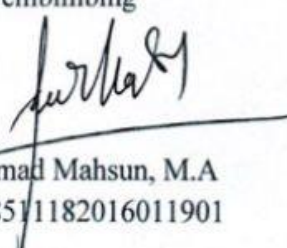
Sekretaris


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

Penguji I


Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 198811152019032018

Pembimbing


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Laili Hero Alfauziah menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *"Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kepemimpinan Suparti Sebagai Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar"* merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Maret 2023

Yang menyatakan,



Laili Hero Alfauziah

NIM. 1906016091

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kepemimpinan Suparti Sebagai Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang lebih terang. Skripsi ini disusun dan diselesaikan penulis guna memenuhi syarat memperoleh gelar Program Strata Satu (S.Sos) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Mengenai penulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu selama proses penelitian ini, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, dan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di jurusan ilmu politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M. A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam hal perkuliahan.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Muhammad Mahsun, M. A yang juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini. Sehingga, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika dan Staf Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Suparti selaku Kepala Desa Nglebak, seluruh aparat pemerintahan Desa Nglebak dan seluruh masyarakat Desa Nglebak selaku informan utama penulis yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan.
8. Ayah dan Ibu Penulis, Alm. Bapak Suwanto dan Ibu Suparwi, dan kakak penulis Alfian Nur Fauzi atas segala dukungan motivasi, moral, material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis sampai titik ini dan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga “Trah Grojogan Sewu” yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga seluruh keluarga penulis diberikan kesehatan, panjang umur, dan hidup yang berkah aamiin.
10. Rekan-rekan dekat penulis Cahya Fatma Pujaningrum, Monica Agustin Atmica Siwi, dan Rizqi Asytiva Sukmadevhi yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis.
11. Rekan-rekan anggota UI Cantik, Rossa Prima Fachrulaina, Rizky Septi Permana, Chantika Avifah Nurachmad, Raihanalda Anistia Putri, dan Aliffah Khoirunnisa yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis.
12. Rekan-rekan ilmu politik C dan seluruh rekan prodi ilmu politik 2019 yang telah memberikan canda tawa, dan semangat bagi penulis. Semoga kedepannya kita semua sukses, aamiin.
13. Rekan-rekan KKN MIT-DR 14 Kelompok 5 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan semangat bagi penulis.

14. Segenap anggota TREASURE yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat secara tidak langsung kepada penulis. Sehingga, penulis termotivasi untuk terus semangat berjuang dalam menjalani kehidupan.
15. Serta semua pihak-pihak yang terlibat dan banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat untuk penulis khususnya ataupun untuk orang lain. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 24 Maret 2023

Penulis,



Laili Hero Alfauziah

NIM. 1906016091

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk Kedua orang tua saya Alm. Bapak Suwanto dan Ibu Suparwi yang telah memberikan seluruh doa dan dukungan serta menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan

Untuk dosen pembimbing sekaligus mentor saya, Bapak Muhammad Mahsun M.A yang telah memberikan segala ilmu dan bimbinganya serta motivasi terbesar agar bisa menjadi orang hebat seperti beliau

Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal kesuksesan saya di masa depan

MOTTO

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia walaupun dalam keadaan sulit sehingga akan membentuk karakter yang kuat melawan kesulitan” (Hellen Keller)

“Just try not to get scared. This isn't scary at all. It won't kill you.”

(Hamada Asahi)

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sumber dan Jenis Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisa Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
KERANGKA TEORI	17
A. Penjelasan Konseptual.....	17
1. Pengarusutamaan Gender.....	17

2. Kepemimpinan Perempuan	21
3. Kepala Desa	22
4. Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Islam	24
B. Teori Pengarusutamaan Gender	26
1. Konsep	26
2. Asumsi Dasar	26
3. Istilah-Istilah Kunci Dalam Teori PUG	27
BAB III.....	29
LANDSCAPE DESA NGLEBAK DAN PROFIL KEPALA DESA	
NGLEBAK.....	29
A. Gambaran Umum Desa Nglebak.....	29
1. Kondisi Geografis.....	29
2. Kondisi Topografis.....	31
3. Kondisi Demografis	33
4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	36
5. Kondisi Pemerintahan	38
B. Profil Kepala Desa Nglebak	40
BAB IV.....	43
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA NGLEBAK KECAMATAN	
TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR	43
A. Program Pembangunan Desa.....	43
B. Program Pembangunan Fisik Desa Nglebak	47
C. Program Pembangunan Non-Fisik Desa Nglebak.....	48
1. Bidang Pendidikan	48
2. Bidang Kesehatan.....	50
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	53

BAB V	57
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA YANG DIJALANKAN OLEH SUPARTI.....	57
A. Pembangunan Fisik Di Desa Nglebak Yang Responsif Gender	57
B. Pembangunan Non-Fisik Di Desa Nglebak Yang Responsif Gender 	52
1. Bidang Pendidikan.....	62
2. Bidang Kesehatan	67
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	74
BAB VI	78
EVALUASI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DESA NGLEBAK.....	78
A. Perencanaan Kebijakan Yang Responsif Gender	78
B. Pelaksanaan Kebijakan Yang Responsif Gender	79
C. Keluaran Kebijakan Yang Responsif Gender	84
BAB VII	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1	3
Tabel 2	30
Tabel 3	31
Tabel 4	33
Tabel 5	34
Tabel 6	35
Tabel 7	39
Tabel 8	47
Tabel 9	49
Tabel 10	50
Tabel 11	54
Tabel 12	58
Tabel 13	66
Tabel 14	66
Tabel 15	72
Tabel 16	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	30
Gambar 2	36
Gambar 3	38
Gambar 4	59
Gambar 5	59
Gambar 6	63
Gambar 7	63
Gambar 8	64
Gambar 9	68

ABSTRAK

Pengarusutamaan gender di ranah pemerintahan dan politik khususnya dalam proses pembangunan telah ditetapkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan diterbitkannya Inpres tersebut maka Pengarusutamaan gender menjadi penting dalam pembangunan baik dalam level nasional maupun lokal seperti kabupaten atau desa. Keberhasilan implementasi PUG tergantung pada kepemimpinan yang sedang berjalan. Tidak sedikit kepemimpinan yang memiliki program PUG selama masa jabatannya, salah satunya Suparti. Suparti merupakan pemimpin perempuan pertama di Desa Nglebak yang dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2020. Suparti merupakan satu-satunya perempuan yang berhasil menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Nglebak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program apa yang ditetapkan oleh Suparti sebagai Kepala Desa, bagaimana Suparti menjalankan program-program pembangunan yang ditetapkan selama kepemimpinannya, dan bagaimana Suparti mengevaluasi program-program pembangunan tersebut dalam periode tahunan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori yang diadopsi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan yang dibantu dengan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini pemilihan narasumber dipilih secara purposive.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan oleh Suparti memiliki prinsip pengarusutamaan gender sampai pada tahap pelaksanaan saja dan tidak sampai pada tahap evaluasi. Hal tersebut dikarenakan aspek PUG masuk dalam setiap pelaksanaan program pembangunan seperti akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sesuai dengan teori yang diadopsi dalam Inpres No 9 Tahun 2000. Suparti berusaha semaksimal mungkin menerapkan prinsip pengarusutamaan gender. Sebagian besar program pembangunannya dapat memenuhi kriteria kesetaraan gender. Namun, prinsip pengarusutamaan gender hanya sampai pada tahap pelaksanaan program saja. Pada tahap evaluasi, Suparti tidak memasukan aspek PUG didalamnya. Suparti memilih menilai suatu program pembangunan secara general dan menitikberatkan pada efektifitas dan partisipasi masyarakat. Karena tolok ukur Suparti dalam mengevaluasi hanya sebatas efektifitas dan partisipasi, masih terdapat beberapa pembangunan yang tidak merata.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Pemimpin Perempuan, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Gender mainstreaming in the realm of government and politics, especially in the development process, has been stipulated in Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. With the issuance of the Presidential Instruction, gender mainstreaming becomes important in development both at the national and local levels such as districts or villages. The successful implementation of Gender Mainstreaming depends on ongoing leadership. Not a few leaderships have PUG programs during their term of office, one of them is Suparti. Suparti is the first female leader in Nglebak Village to be appointed village head in 2020. Suparti is the only woman who has successfully served as Village Head in Nglebak Village. This study aims to find out what programs were determined by Suparti as the Village Head, how Suparti carried out the development programs set during his leadership, and how Suparti evaluated these development programs in an annual period.

To answer the research questions above, this study uses a theory adopted from Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development with describe phenomena from data obtained in the field assisted by qualitative research methods that prioritize research procedures by presenting descriptive data. The type of approach used is a case study approach. Collecting data in this study using the interview method and the documentation method. In this study the selection of informants was chosen purposively.

The results of this study indicate that the development programs implemented by Suparti have the principle of gender mainstreaming up to the implementation stage only and not to the evaluation stage. This is because PUG aspects are included in every implementation of development programs such as access, participation, control, and benefits in accordance with the theory adopted in Presidential Decree No. 9 of 2000. Suparti tries as much as possible to apply the principle of gender mainstreaming. Most of its development programs meet the criteria for gender equality. However, the principle of gender mainstreaming only extends to the program implementation stage. At the evaluation stage, Suparti did not include PUG aspects in it. Suparti chooses to assess a development program in general and focuses on effectiveness and community participation. Because Suparti's benchmarks in evaluating are only limited to effectiveness and participation, there are still some uneven developments.

Keywords: Gender Mainstreaming, Women Leaders, Village Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan gender di ranah pemerintahan dan politik khususnya dalam proses pembangunan telah ditetapkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan diterbitkannya Inpres tersebut maka Pengarusutamaan gender menjadi penting dalam pembangunan baik dalam level nasional maupun lokal (Nugroho, 2008). Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) tampak dalam keseluruhan program pembangunan di Indonesia seperti contoh terkait dengan ketetapan keanggotaan baik di legislatif maupun di eksekutif. Seperti dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% seperti yang dikutip pada *dialektika.com* tertanggal 3 Februari 2023.

Demikian pula program-program pembangunan pemerintah harus mengacu pada prinsip pengarusutamaan gender. Contoh pembangunan yang dilandaskan pada PUG misalnya kebijakan penerimaan beasiswa yang harus berimbang antara laki-laki dan perempuan, kemudian ketetapan admisi kepegawaian yang berbasis PUG, dan program-program pembangunan yang berkait dengan industri yang mempertimbangkan aspek PUG seperti yang dikutip pada *theconversation.com* tertanggal 3 Februari 2023. Dengan demikian, PUG merupakan sebuah program pemerintah yang tidak hanya bersifat instruksi namun harus dilaksanakan sampai level program (Nugroho, 2008).

Studi tentang pengarusutamaan gender ini penting sehingga menarik banyak sarjana untuk mengkaji hal tersebut. Studi yang dilakukan oleh Annisa et al. (2021) ; Dahlia (2021); Utaminingsih (2020) mempunyai spesifikasi kajian yang berda-beda. Annisa et al. (2021) memfokuskan kajian pada faktor suksesnya program pengarusutamaan gender. Annisa et al. (2021) menemukan bahwa faktor

suksesnya program pengarusutamaan gender adalah kerja sama antara aparat pembuat kebijakan dan masyarakat pada semua lapisan. Sepakat dengan Annisa et al. (2021), kajian yang dilakukan Dahlia (2021) juga berfokus pada faktor suksesnya program pengarusutamaan gender dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci suksesnya program PUG. Sedangkan Utaminingsih (2020) memfokuskan kajian pada hambatan yang ditempuh oleh pemimpin desa dalam menjalankan program PUG. Utaminingsih (2020) menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang gender dalam pembangunan merupakan hambatan terbesar karena masih banyak masyarakat yang sangat patriarki. Sehingga dalam menggerakkan sebuah kebijakan yang responsif gender, tidak jarang gagal atau berhenti di tengah jalan.

Berbeda dengan penelitian oleh sarjana sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada program pembangunan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin perempuan yaitu kepala desa. Suparti merupakan kepala desa perempuan pertama di desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Suparti dilantik menjadi kepala desa Nglebak pada tahun 2020. Suparti bukanlah nama baru bagi masyarakat Desa Nglebak. Kiprahnya di Desa Nglebak sudah banyak diketahui oleh masyarakat baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Selain dikenal sebagai istri dari pengusaha sukses, Suparti pernah menjadi ketua karang taruna Desa Nglebak pada tahun 2018 sampai 2019. Dalam masa jabatannya sebagai ketua karang taruna, Suparti dikenal handal dalam memimpin karang taruna. Karang taruna di Dukuh Kranglean menjadi aktif kembali dan banyak melakukan kegiatan seperti kegiatan bansos (bantuan sosial) dan lomba-lomba untuk memperingati hari besar nasional.

Studi ini dilakukan di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Desa Nglebak merupakan desa yang dalam sejarahnya selalu dipimpin oleh kepala desa laki-laki. Desa Nglebak pada jaman dahulu dipimpin oleh Demang bernama Ponco Suroto yang kemudian pada tahun 1958 digantikan oleh Samekto Hadi Sisworo sampai pada tahun 1966. Berikut tabel daftar kepala desa Nglebak sampai pada tahun 2022.

Tabel 1. Daftar Kepala Desa Nglebak

No.	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat
1.	Demang Ponco Suroto	1950-1958
2.	Samekto Hadi Sisworo	1958-1966
3.	Asmo Suyatno	1966-1974
4.	Sastro Sularno	1974-1989
5.	Padi harto Supadmo	1989-1995
6.	Mulyono	1995-2001
7.	Padi Harto Supadmo	2001-2007
8.	Kardi	2007-2013
9.	Widodo, S.P	2013-2019
10.	Suparti	2019 (Oktober) -2024

(Sumber : Kantor Kepala Desa Nglebak)

Pada tahun 2020 untuk pertama kalinya, jabatan kepala desa dipegang oleh perempuan. Pelantikan Suparti sebagai kepala desa merupakan satu fase baru dalam sejarah Desa Nglebak dimana Desa Nglebak akhirnya dipimpin oleh kepala desa perempuan. Suparti merupakan satu diantara delapan kepala desa perempuan di Kabupaten Karanganyar yang berhasil menduduki jabatan sebagai kepala desa. Selain kepemimpinan perempuan, desa ini didukung juga oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) perempuan. Karena itu kemudian penulis ingin mengkaji apakah kepemimpinan perempuan yang dalam hal ini adalah Suparti, sama dengan kepemimpinan laki-laki dan bagaimana kaitannya dengan program-program pembangunannya. Selain itu, penulis ingin mengkaji apakah kepemimpinan perempuan yang dalam hal ini adalah Suparti, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang diusungnya memiliki prespektif pengarusutaman gender atau tidak.

Studi ini memfokuskan pada tiga hal. Pertama, mengkaji persoalan program pembangunan desa apa yang diadopsi di Desa Nglebak dibawah kepemimpinan

Suparti. Kemudian, bagaimana program-program pembangunan tersebut dijalankan oleh Suparti dan bagaimana Suparti melakukan evaluasi program-program pembangunan tersebut setiap tahun. Studi ini penting untuk dilakukan karena dua argumen. Pertama, memberikan pengetahuan sejauhmana kepemimpinan perempuan di level akar rumput memiliki keberpihakan pada kepentingan perempuan. Kedua, memeberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan program-program pembangunan oleh pemimpin perempuan. Ketiga, bagaimana evaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh kepemimpinan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab tiga permasalahan utama sebagai berikut:

1. Apa program pembangunan desa yang ditetapkan oleh Suparti sebagai Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana Suparti menjalankan program-program pembangunan yang *responsive* gender selama kepemimpinannya sebagai Kepala Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimana Suparti sebagai kepala desa perempuan mengevaluasi program-program pembangunan tersebut dalam periode tahunan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah didalam program pembangunan yang ditetapkan oleh Suparti sebagai Kepala Desa Nglebak terdapat prespektif pengarusutamaan gender atau tidak.
2. Untuk menganalisis upaya Suparti sebagai kepala desa dalam menjalankan program pembangunan yang *responsive* gender.

3. Untuk mengetahui sejauhmana Suparti melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya tentang kepemimpinan kepala desa perempuan beserta program pengarusutamaan gender dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, dapat memberikan pandangan bagaimana kewajiban pemimpin dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pandangan bagaimana pengarusutamaan gender harus ada dalam program pembangunan desa.
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan penambah pandangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pembangunan desa.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang perempuan dan politik sudah banyak dilakukan oleh para sarjana sebelumnya. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh penulis, studi yang berkaitan dengan perempuan dan politik terutama keterkaitan dengan fokus studi ini, penulis melakukan literatur yang berkaitan dengan topik pengarusutamaan gender, dan kepemimpinan perempuan. Berdasarkan studi yang penulis lakukan pada sejumlah literatur, penulis bagi menjadi dua topik yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG), Kepemimpinan Perempuan, dan Kepala Desa.

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Studi tentang pengarusutamaan gender (PUG) sudah banyak dikaji oleh banyak sarjana. Diantara sekian banyak peneliti seperti Dahlia (2021); Annisa (2021); Tazkia & Cadith (2021); dan Utaminingsih (2020). Studi yang dilakukan oleh Dahlia (2021) dan Annisa (2021) berfokus pada faktor pendorong atau faktor suksesnya program pengarusutamaan gender (PUG). Mereka sepakat bahwa faktor suksesnya program pengarusutamaan gender adalah kerja sama antara aparat pembuat kebijakan dan masyarakat pada semua lapisan. Kerja sama dapat terjalin jika masyarakat sadar akan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) lalu ikut berpartisipasi dalam program PUG dan pemenuhan fasilitas oleh aparat pada program-program pengarusutamaan gender. Studi oleh Dahlia (2021) dan Anisa (2021) ini menunjukkan argumen bahwa partisipasi masyarakat itu penting dalam program pengarusutamaan gender. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting disebabkan oleh banyaknya program pengarusutamaan gender yang tidak berhasil dimana faktor utamanya adalah partisipasi masyarakat yang hanya sebatas ikut ketika sosialisasi saja. Dalam kenyataan di lapangan, seperti saat pengambilan keputusan keterlibatan perempuan dan laki-laki terpaut sangat jauh. Ini berarti program yang dijalankan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, meskipun sudah memiliki perencanaan yang matang.

Studi oleh Tazkia & Cadith (2021) dan Utaminingsih (2020) berfokus pada faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program pengarusutamaan gender ada pada pihak aparat pelaksana program pengarusutamaan gender (PUG). Tazkia & Cadith (2021) memiliki argumen bahwa faktor pendorong suksesnya program pengarusutamaan gender adalah pada pihak aparat pemerintah yang merencanakan serta memfasilitasi masyarakat untuk program tersebut. Kesiapan yang matang sangat diperlukan dalam menjalankan program pengarusutamaan gender. Seringkali program pengarusutamaan gender belum dilaksanakan dengan baik karena OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum siap melaksanakan programnya. OPD yang kurang partisipatif, kurang koordinasi, dan kurang disiplin dalam bertugas atau kurangnya SDM yang dapat memfasilitasi program

PUG menjadi hambatan dalam pelaksanaan PUG. Hambatan-hambatan yang ada bertumpu pada aparat pemerintah. Meskipun sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang program pengarusutamaan gender tetapi aparat pemerintahnya tidak bekerja dengan baik dan matang maka program pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan baik pula.

2. Kepemimpinan Perempuan

Studi tentang kepemimpinan perempuan rata-rata sudah ditulis oleh banyak sarjana antara lain Jazilah (2020); Setyawati (2022); Saputra & Azmi (2021); dan Utamingsih et al., (2020). Studi yang dilakukan oleh Jazilah (2020) dan Setyawati (2022) sepakat bahwa strategi kepemimpinan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Strategi kepemimpinan yang demokratis, kemajuan desa diprioritaskan, memberi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, mendisiplinkan kinerja perangkat desa, menyelenggarakan pemerintahan desa dengan adil, jujur dan transparan terbukti dapat menggiring opini masyarakat untuk lebih percaya pada kepemimpinan perempuan dan meninggalkan pandangan stereotipe dimana perempuan dianggap tidak berkompeten dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa jika perempuan diberi panggung untuk menjadi pemimpin maka mereka dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai pemimpin dengan kapasitas dan kapabilitasnya.

Studi yang dilakukan Saputra & Azmi (2021) dan Utamingsih et al., (2020) berfokus pada kepemimpinan kepala desa perempuan dalam menjalankan program-program pembangunan desa, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Mereka sepakat mengemukakan bahwa kepemimpinan perempuan dapat dibuktikan kiprahnya, salah satunya melalui program-program pembangunan yang diterapkan pada masa jabatannya. Program pembangunan desa yang tidak hanya membangun infrastruktur saja namun juga program yang dapat memberdayakan masyarakat. Inovasi pembangunan Desa Bunder yang berada di Madura yang sebelumnya merupakan desa berstatus

tradisional berhasil diubah oleh kepala desa perempuan menjadi desa swasembada. Program-program pembangunan desa yang dirancang oleh kepala desa tentunya juga membutuhkan dukungan baik dari aparat pemerintah desa maupun semua lapisan masyarakat. Nilai feminin yang digunakan oleh kepala desa perempuan sangat diperlukan untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat, seperti kecakapan untuk membujuk dan berdiskusi dengan warga desa atau perangkat desa, dapat saling memberi kritik saat menjalankan program sekaligus juga menerima kritik dengan baik ketika menjalankan program, mempunyai tekad kuat saat melaksanakan program pembangunan desa dan pada saat memajukan desa, mengutamakan semangat kerja tim, serta berani mengambil resiko. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut masyarakat dapat membuang jauh stereotipe bahwa perempuan tidak berkompeten untuk menjadi pemimpin.

3. Kepala Desa

Studi tentang kepala desa sudah banyak dikaji oleh banyak sarjana. Seperti yang dilakukan oleh Nursetiawan, Ratnasari, & Sihabudin (2022); Yogiwati & Aco (2022); Bramantyo & Windradi (2022); dan Pilaili, Pusparini, & Nurabiah (2022). Studi oleh Nursetiawan, Ratnasari, & Sihabudin (2022) dan Yogiwati & Aco (2022) sepakat bahwa kurangnya koordinasi dan produk advokasi masih menjadi masalah yang dihadapi kepala desa. Mereka menemukan bahwa terdapat indikasi bahwa kepala desa kurang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang muncul, meliputi komunikasi yang belum berjalan intensif, pendefinisian tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa, dan kurangnya evaluasi prestasi kerja. Upaya yang telah dilakukan, yakni melalui musyawarah dalam setiap pembuatan kebijakan, membuat struktur organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, melakukan evaluasi prestasi kerja. Namun Yogiwati & Aco (2022) menemukan bahwa selain hambatan diatas, terdapat faktor penghambat lain yang mempengaruhi kepala desa dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya yaitu pemberian jabatan dari relasi

keluarga. Penelitian ini berargumen bahwa masyarakat tidak terlalu menghormati kepemimpinan yang dalam hal ini adalah kepala desa bersifat turun temurun. Menurut Yogiwati & Aco (2022) terjadinya kepemimpinan turun temurun ini didukung oleh politik uang.

Studi oleh Bramantyo & Windradi (2022) dan Pilaili, Pusparini, & Nurabiah (2022) sepakat bahwa kepala desa menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe partisipatif dapat meningkatkan partisipasi pada semua lapisan masyarakat. Adapun partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat atau masyarakat. Temuannya adalah pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan desa. Menurut Pilaili, Pusparini, & Nurabiah (2022) peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal dilihat dari perannya sebagai motivator, fasilitator dan innovator. Respon masyarakat adalah menyadari bahwa kesempatan yang diberikan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa dalam partisipasinya merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian dan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Studi yang akan dilakukan oleh peneliti bukan terfokus pada bagaimana strategi kepemimpinan kepala desa agar bisa menunjukkan kapabilitasnya pada masyarakat dan bukan pula terfokus pada analisa faktor yang mendorong suksesnya kepemimpinan kepala desa. Peneliti akan terfokus kepada persoalan program pembangunan desa apa yang diadopsi di Desa Nglebak dibawah kepemimpinan Suparti. Kemudian, bagaimana program-program pembangunan tersebut dijalankan oleh Suparti dan bagaimana Suparti melakukan evaluasi program-program pembangunan tersebut setiap tahun. Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk dikaji dikarenakan penelitian ini akan menjadi penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy, 1991). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah pertanyaan-pertanyaan yang paling baik menggambarkan secara verbal bagaimana peserta dalam suatu penelitian memandang dan menginterpretasikan berbagai aspek. Penelitian kualitatif mengacu pada proses yang berorientasi metode yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan dan mengembangkan suatu teori tentang suatu fenomena. Ini adalah pendekatan subjektif dan sistematis yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena.

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dimana metode ini sejalan dengan penelitian kualitatif dan dapat mendukung penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan studi yang mengkaji adanya permasalahan dan memiliki batasan yang rinci, menyertakan berbagai informasi yang di dapat, dan memiliki pengambilan data yang mendalam, penelitian tersebut memiliki batasan waktu serta kasus-kasus, dan tempat sehingga dapat difahami seperti aktivitas, peristiwa, program, atau individu (Rahmat, 2009).

Kemudian menurut Mulyana (2010) studi kasus yaitu gambaran atau pandangan serta penjelasan yang komprehensif terkait dengan berbagai aspek individu maupun organisasi (dari suatu program, berdasarkan komunitas, berdasarkan situasi sosial, dan kelompok). Langkah untuk memahami dan mempelajari lebih detail lagi pada individu, adanya kejadian yang terjadi, serta kelompok maka peneliti mempunyai tujuan untuk menyampaikan pandangannya yang mendalam dan lengkap terkait subjek yang sudah diteliti (Muhammad, 2013).

Penelitian dengan metode studi kasus dapat melihat lebih detail Suparti sebagai kepala desa Nglebak selama masa jabatannya. Metode studi kasus tidak hanya melihat program-program yang dijalankan Suparti sebagai kepala desa Nglebak. Namun, dengan metode ini peneliti dapat melihat Desa Nglebak dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga dapat lebih detail dalam menjelaskan objek penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto (2013) data primer yaitu data yang didapatkan berdasarkan pihak pertama, dan biasanya melalui proses wawancara atau jejak lainnya. Sedangkan pendapat dari Sugiyono (2012) data primer merupakan data yang secara langsung memberikan informasi atau data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam kajian ini dihasilkan berdasarkan proses wawancara yang dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh peneliti, dan hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan diperoleh sesuai dengan narasumber yang ahli di bidangnya atau berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara mengambil dari berbagai sumber seperti dari berbagai buku, artikel, jurnal penelitian dan berbagai sumber dari aneka macam media baik media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan tema perempuan dan politik, kepemimpinan perempuan, serta pengarusutamaan gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti terjun langsung maupun tidak langsung untuk mengumpulkan data pada sumber data utama dalam penelitian. Dalam observasi, peneliti sebisa mungkin ikut serta dalam aktivitas kepala desa. Diawal penelitian observasi juga dijalankan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tentang kepala desa serta informasi mengenai pemerintahan desa. Teknik observasi ini diterapkan guna mengetahui data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat, dan rekaman gambar (Ahmadi, 2014). Teknik observasi digunakan untuk mengetahui keberpihakan Suparti pada program pengarusutamaan gender dan upaya mengadvokasi program pengarusutamaan gender (PUG).

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara dilakukan agar mendapatkan sumber data ataupun informasi dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara keduanya dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan oleh peneliti. Pedoman wawancara yang disediakan oleh peneliti digunakan agar percakapan yang terjadi antara pewawancara dan narasumber terfokus pada penelitian sehingga tidak kehilangan arah (Ahmadi, 2014). Terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan mencari informan dan melakukan wawancara yang diasumsikan mengetahui tentang kajian ini yang diantaranya wawancara dilakukan kepada aparat pemerintahan Desa Nglebak serta masyarakat Desa Nglebak. Untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya, maka penulis menggunakan wawancara terstruktur yang dimana penulis akan membuat pertanyaan secara tertulis serta untuk mendukung hasil data yang diperoleh maka peneliti juga akan melakukan rekaman suara sehingga diharapkan bisa mempermudah saat pengolahan data.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Berdasarkan pada sebagian fakta dan data yang sudah tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi memiliki sifat identik yaitu tidak memiliki keterbatasan pada waktu dan ruang sehingga berguna memberikan peluang kepada peneliti untuk memberikan informasi terkait segala sesuatu yang sudah terjadi pada waktu yang lampau. Jika dilihat lebih detail lagi, bahan dokumenter dibagi kedalam beberapa macam seperti surat-surat pribadi, otobiografi, buku, dokumen pemerintah maupun swasta, data tersimpan pada website serta data yang tersimpan pada flashdisk dan server.

Sumber dokumen ini sangat penting untuk penulis, yang dimana dalam memberikan suatu deskripsi terkait dengan permasalahan sosial maka dibutuhkan dokumen supaya bisa mendukung dan menguatkan hasil-hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti. Studi dokumen dilakukan dengan pengumpulan sejumlah dokumen untuk membantu dan melengkapi penelitian. Dokumen yang dikumpulkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan ini dilakukan agar mendukung peneliti dalam menganalisis semua dokumen yang terkait dengan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam penelitian. Teknik selanjutnya adalah menerapkan studi literatur dengan pengumpulan data yang berasal dari sejumlah buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dapat dilakukan dengan cara mencari kemudian menyusun secara sistematis berdasarkan data yang sudah dihasilkan dari proses wawancara dan dokumentasi, serta catatan lapangan. Kemudian mengorganisasikan pada beberapa kategori, dilakukannya sintesa, membuat pola, lalu menjabarkan kedalam beberapa unit, supaya dapat dipilih yang penting dan bisa untuk dipelajari, sehingga dapat disusun kesimpulan yang diharapkan supaya mudah difahami oleh diri sendiri ataupun individu lain (Sugiyono,2013). Metode

analisis yang digunakan pada kajian ini berawal dari data kualitatif yang kemudian diolah menjadi data yang berbentuk kualitatif-deskriptif, serta dalam pengolahannya dipilah mana data yang penting dan tidak penting, lalu untuk mendukung pada proses tersebut maka dilakukan metode wawancara terstruktur dan dokumen sehingga memberikan kemudahan untuk peneliti dalam mengkaji terkait. Teknik analisis data dilakukan agar data yang sudah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara menjadi lebih bermakna dan dapat dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada serta agar dapat ditafsirkan lebih mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis. Menurut Miles & Huberman (1992) dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga aktivitas dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses meminimalkan jumlah data yang perlu disimpan dalam lingkungan penyimpanan data dan diklasifikasikan sesuai keperluan. Memilah dan merangkum data merupakan cara yang dilakukan dalam reduksi data. Pemilahan data diklasifikasikan sesuai dengan topik penelitian agar mudah dipahami penulis.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan deskripsi terstruktur tentang informasi dari lapangan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan agar memudahkan peneliti untuk memahami dan menemukan analisa dari temuan data lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasi dengan mencari makna gejala yang diperoleh dari objek penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan dan dari data yang sebelumnya

sudah direduksi. Kemudian menyelaraskan catatan dan pengamatan yang telah dilakukan peneliti pada saat melakukan analisis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang menguraikan tentang alasan yang melatarbelakangi penelitian yang kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan permasalahan. Pada bab ini juga akan diuraikan tentang tujuan penelitian, manfaat, metode, dan pendekatan penelitian. Selain itu pada bab ini akan disajikan konsep serta bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG), KEPEMIMPINAN POLITIK, DAN KEPALA DESA

Pada Bab ini peneliti mendeskripsikan secara detail teori-teori yang mencakup teori Gender dan Politik serta teori Pengarusutamaan Gender. Dari teori-teori tersebut akan di paparkan dalam Bab ini dengan tujuan semakin mematangkan konsep teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis dari data-data penelitian yang dilakukan

BAB III LANDSCAPE DESA NGLEBAK KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam Bab ini akan disajikan mengenai gambaran umum Desa Nglebak sebagai lokasi penelitian. *Landscape* Desa Nglebak akan diuraikan mengenai profil lengkap Desa Nglebak yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi topografis, dan demografis yang terdiri dari struktur sosial, budaya, dan ekonomi.

BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DESA NGLEBAK KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Pada Bab ini akan menguraikan program pembangunan Desa Nglebak yang diusung oleh Suparti sebagai kepala desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

BAB V PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA YANG DIJALANKAN OLEH SUPARTI

Pada Bab ini akan menganalisis bagaimana Suparti menjalankan program pembangunan di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

BAB VI EVALUASI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DESA NGLEBAK

Dalam bab ini akan menguraikan sejauhmana Suparti melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB VII PENUTUP

Pada bab penutup akan disajikan kesimpulan dari serangkaian penulisan penelitian yang dilakukan. Pada bab ini memuat jawaban akhir dari rumusan masalah yang ada. Selain itu, pada bab ini juga menyajikan saran untuk penelitian serupa kedepannya.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisa program pengarusutamaan gender oleh Suparti sebagai Kepala Desa Nglebak, peneliti akan menggunakan beberapa konsep sebagai kerangka teori kajian. Pertama tentang Pengarusutamaan Gender yang didalamnya memuat tentang konsep pengarusutamaan gender. Kemudian yang kedua tentang Kepemimpinan Politik yang memuat tentang konsep kepemimpinan perempuan, kepemimpinan perempuan menurut prespektif Islam, dan kepala desa. Kemudian peneliti menggunakan teori yang diambil dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 sebagai teori utama untuk Pengarusutmaan Gender.

A. Penjelasan Konseptual

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebelum Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 diterbitkan, pemerintah Indonesia sudah menegaskan pentingnya peningkatan kedudukan peranan perempuan dalam pembangunan nasional. banyak program-program pembangunan yang memberi perhatian terhadap persoalan perempuan tepatnya sejak Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978. Pembangunan yang selama ini berjalan telah memberikan perhatian pada perempuan, meski dioorientasikan pada program peningkatan peranan keluarga. Sejak Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978, pemerintah Indonesia sudah menegaskan pentingnya peningkatan kedudukan peranan perempuan dalam pembangunan nasional. Sejak itu pemerintah mulai mengembangkan program-program untuk peningkatan peranan wanita (P2W). Program ini didasarkan pada kebijakan atau pendekatan pengintegrasian perempuan dalam pembangunan atau yang dikenal dengan *Women in Developmen* yang disingkat WID (Fitriyah, 2012). Asumsi dasar pendekatan WID adalah dengan melibatkan perempuan dalam

kegiatan ekonomis yang menguntungkan, harapannya kedudukan perempuan secara otomatis akan meningkat pula.

Namun, dalam perjalannya program GAD (*Gender And Development*) yang dirancang untuk menyetarakan partisipasi perempuan dalam pembangunan, ternyata tidak berbanding lurus dengan realitas dilapangan. Jika dikaji lebih mendalam justru memperkuat marginalisasi dan eksploitasi perempuan. Hal ini misalnya tercermin dalam program PKK yang hanya memperkuat posisi domestik perempuan. Sedangkan masuknya perempuan ke sektor industri atau manufaktur dengan kewajiban sama dengan kaum laki-laki di dunia kerja, justru menambah beban kerja perempuan. Mengingat kerja produktif di rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan, yang konsekuensinya perempuan memiliki beban ganda. (Fitriyah, 2012). Program atau proyek WID secara umum memang cukup berhasil. Setidaknya tampak dari menurunnya Total Fertility Rate dari 5,2 di tahun 1970 menjadi 2,8 di tahun 1997 (BPS, 1998).

Setelah WID dan GAD mendapat kritikan tajam dari beberapa kalangan karena dinilai gagal mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, munculah strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi gender-yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai subjek dan objek yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Pada prinsipnya PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai kehidupan dan pembangunan (Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2000).

Definisi umum tentang pengarusutamaan gender diambil dari ECOSOC:

“Gender mainstreaming is the gender perspective, the process of assessing the impact of planned actions, including legislation, policies and programs, on women and men in all areas and at all levels. It is a strategy to respect the interests and experiences of women and men, and to design, implement and monitor policies and programs in all political, economic and social spheres to ensure that equality between women and men is not maintained. , is an integral aspect of the evaluation, the main goal is gender equality “ (UN ECOSOC 1997 dalam Mehta dan Gupta 2006).

Berdasarkan pandangan Mehta dan Gupta, pengarusutamaan gender merupakan upaya menyempurnakan kebijakan pro perempuan atau pro gender yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas perencanaan, penerapan, dan evaluasi (Mehta dan Gupta, 2006). Sedangkan, menurut Meier & Lombardo (2013) konsep pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai suatu strategi yang ditempuh oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengurangi terjadinya kesenjangan gender serta meraih kesetaraan gender dalam rencana pembangunan. Pengarusutamaan gender diterapkan melalui kebijakan dan program yang didasarkan pada pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pada berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Di Indonesia definisi tersebut diadopsi dalam Inpres No. 9 tahun 2000. Pengarusutamaan gender harus dilaksanakan pada setiap tahap mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan termasuk penganggarannya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing (Wiasti, 2017).

Walby (2005), berpendapat bahwa kesetaraan gender dan PUG adalah dua hal yang berbeda, meskipun sangat berkaitan. Pembahasan tentang kesetaraan gender adalah membicarakan tentang target program PUG. Adanya PUG tidak langsung menciptakan kesetaraan gender. Walby menekankan bahwa sebagai produk akhir, kesetaraan gender, tidak mudah memberi cap bahwa program PUG tidak berjalan.

Bahkan, hal ini menjadi bahan untuk evaluasi eksistensi dari program PUG yang dikembangkan dalam lembaga atau organisasi. Dengan demikian, PUG adalah upaya bagi konsep gender untuk dapat masuk ke dalam institusi. Maka dari itu, terdapat beberapa aspek dalam kesetaraan gender yang digunakan untuk mengevaluasi PUG (Wably, 2005)

Terwujudnya setiap tahap dalam program pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang responsif gender merupakan tujuan program pengarusutamaan gender. Selain itu, tujuan lain pengarusutamaan gender adalah terwujudnya keadilan serta kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) yang diterima laki-laki maupun perempuan harus setara, baik yang diwacanakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Diharapkan diskriminasi berkurang dengan adanya pengarusutamaan gender sehingga akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari program pembangunan dapat dirasakan bersama baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Terdapat empat aspek indikator kesetaraan gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Aspek yang pertama adalah aspek akses yang dimaknai sebagai kesempatan atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan manfaat pembangunan. Aspek yang kedua adalah aspek partisipasi yang dimaknai sebagai keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan atau suatu program. Aspek yang ketiga yaitu aspek kontrol yakni peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Aspek yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat yaitu peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan atau suatu program. Keempat aspek ini menjadi indikator kesetaraan gender dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. (Herawati, 2020).

2. Kepemimpinan Perempuan

Menurut Peter G. Northouse (dalam Alfian, 2018) kepemimpinan memiliki definisi yaitu suatu proses dimana seseorang mempunyai pengaruh dalam suatu kelompok untuk menggerakkan individu-individu lain meraih tujuan bersama. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah sikap mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan visi misi yang kuat, bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan karakter dari seseorang (Alfian, 2018). Cara mempengaruhi dapat bermacam-macam, antara lain dengan memberikan gambaran masa depan yang lebih baik, memberikan perintah, memberikan imbalan, melimpahkan wewenang, mempercayai bawahan, memberikan penghargaan, memberi kedudukan, memberi tugas, memberi tanggung jawab, memberi kesempatan mewakili, mengajak, membujuk, meminta saran, meminta pendapat, meminta pertimbangan, memberi kesempatan berperan, memenuhi keinginan, memberi motivasi, membela, mendidik, membimbing, memberi petunjuk, memelopori, mengobarkan semangat, menegakkan disiplin, memberikan teladan, mengemukakan gagasan baru, memberikan arah, memberikan keyakinan, mendorong kemajuan, menciptakan perubahan, memberi ancaman, memberikan hukuman, dan lain-lain (Qomariyah, 2016).

Salah satu tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh pemimpin adalah bagaimana dia dapat menggerakkan para bawahannya agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan kelompok. Seorang pemimpin apabila ingin mencapai tujuan dengan efektif maka harus mempunyai wewenang untuk memimpin para bawahannya dalam usaha mencapai tujuan. Wewenang ini merupakan hal untuk bertindak atau mempengaruhi tingkah laku orang yang dipimpinnya. Setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi. Sosok pemimpin disaat ini pun berfokus kepada kompetensi dan prestasi sehingga gender bukan merupakan faktor pembeda dominan. Banyak pemimpin perempuan yang jauh lebih hebat dari para pemimpin pria dikarenakan mereka berusaha lebih keras dan ulet dalam menjalankan pemerintahan. Dalam segi pemerintahan peran dan

kedudukan perempuan semakin meningkat yang dapat dilihat lewat pembangunan peran perempuan tidak hanya di perkotaan saja melainkan di semua lini kehidupan juga turut dapat ikut berperan dengan posisi jabatan yang strategis (Qomariyah, 2016).

Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, menurut Rahmatia (2021) di antara sektor pemerintahan dan politik yang telah dimasuki perempuan, kepemimpinan perempuan merupakan hal yang sangat menarik sekaligus sangat penting. Menarik dikarenakan secara historis memang masih sangat sedikit keterlibatan kaum perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Kemudian, sangat penting karena sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan memiliki peran besar untuk kebijakan yang diambil, khususnya berkaitan dengan peran perempuan secara menyeluruh untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai pemimpin membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan. Kini perempuan mampu memberikan suara dalam berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini adalah sebuah kebijakan dalam memperoleh manfaat kesetaraan serta adil dari pembangunan. Kini saatnya para wanita maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan (Rahmatia, 2021).

3. Kepala Desa

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan pembangunan merupakan salah satu tugas seorang kepala desa. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang diadakan oleh Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan satu tahun sekali dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 5 tahun. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada suatu organisasi atau pemerintahan, karena

kepemimpinan dapat mempengaruhi masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai visi dan misi pembangunan desa.

Kepala desa dikenal dengan kepala desa yang mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Dimana dalam setiap kegiatannya kepala desa selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Lamangida et al. (2017) mengatakan bahwa kinerja kepemimpinan harus sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan dan kepala desa harus mampu menjadi motivator serta mobilisator bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Salma et al. (2021) mengatakan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran yang sangat strategis untuk keberhasilan pembangunan fisik desa karena desa merupakan pemerintahan terkecil. Oleh sebab itu, kepala desa merupakan pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat. Kepala desa seharusnya dapat lebih mendengar keluhan-keluhan yang ada di masyarakat secara mendetail karena sifatnya yang sangat dekat dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut diharapkan kepala desa mampu membangun desa dan memajukan desa sesuai potensi yang dimiliki desa baik dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta mampu bersinergi bersama masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi.

4. Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Islam

Peran perempuan dalam konteks kepemimpinan di berbagai kehidupan termasuk dalam pemerintahan masih menjadi masalah yang kontroversial, terutama dikalangan para ulama. Menurut sebagian pandangan ulama, ada yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin termasuk dalam hal kenegaraan. Namun, sebagian ulama lain tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Hal ini tergantung kepada masing-masing argumentasi yang dibangunnya dengan berbagai pertimbangan (Juliati, 2009). Dalam Surat Maryam, mengisahkan keteladanan seorang perempuan yang mempunyai derajat ketakwaan paling tinggi di antara semua perempuan di masanya, beliau bernama Maryam

binti Imran. Kisah lainnya dalam al-Qur'an terdapat kisah seorang perempuan yang menjadi pemimpin. Bahkan al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang dijadikan sebagai seorang pemimpin disebuah negeri yang dikisahkan melalui figur seorang Ratu Balqis yang berasal dari negeri Saba'. Sebagaimana berada dalam surat an-Naml ayat 23.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”

Menurut Quraish Shihab (2020) setelah melakukan penafsiran ayat diatas, perempuan dapat menjadi pemimpin bagi sesama perempuan ataupun laki-laki. Dengan catatan bahwa perempuan tersebut tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai seorang istri bagi suaminya, dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dalam hal mengenai tugas pokok ini, Quraish Shihab berpegang pada surat al-Ahzab ayat 33. Quraish Shihab berpendapat bahwa pada surat an-Nisa ayat 34 ada relevansinya dengan surat al-Ahzab ayat 33. Yaitu pada an-Nisa ayat 34, membicarakan tentang kepemimpinan laki-laki dalam lingkup keluarga bukan dalam hal publik.

Quraish Shihab menolak anggapan yang melarang jika seorang perempuan menjadi pemimpin, karena menurutnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam publik. Dengan catatan bahwa perempuan tersebut tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya hal ini berkaitan dengan surat al-Ahzab ayat 33 yang membicarakan tentang perempuan untuk dirumah sesuai dengan tugas pokoknya (Shihab, 2020). Dengan demikian dalam hal kepemimpinan masih ada kesempatan bagi kaum perempuan untuk bisa mendapatkan haknya diluar dari tugasnya sebagai ibu rumah tangga, karena jika hanya didasarkan pada surat al-Ahzab ayat 35, ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan,

baik dari segi sosial maupun keagamaan. Karena memang antara laki-laki dan perempuan saling berkaitan dalam kehidupan (Khoer, Gustiawati, & Yono, 2021).

B. Teori Pengarusutamaan Gender

1. Konsep

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender memiliki konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat merupakan proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan.

Proses pengidentifikasian tersebut dinamai dengan analisa gender. Maka dalam analisa gender, terdapat empat aspek indikator dalam pengarusutamaan gender yaitu aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Pertama, aspek akses yang dimaknai sebagai kesempatan atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan manfaat pembangunan. Kedua, aspek partisipasi yang dimaknai sebagai keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan atau suatu program. Ketiga, aspek kontrol yakni peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Aspek yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat yaitu peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan atau suatu program (Inpres No. 9 Tahun 2000).

2. Asumsi Dasar

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 memiliki asumsi bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Selain itu, pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

3. Istilah-Istilah Kunci Dalam Teori PUG

- Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
- Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan- hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.

- Sensitivitas gender adalah kemampuan atau kepekaan di lingkungan organisasi kemahasiswaan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam siklus kehidupan berorganisasi kemahasiswaan.

BAB III

LANDSCAPE DESA NGLEBAK DAN PROFIL KEPALA DESA NGLEBAK

A. Gambaran Umum Desa Nglebak

1. Kondisi Geografis

Desa Nglebak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Desa Nglebak merupakan desa penghubung antara Desa Sepanjang dengan Kelurahan Tawangmangu. Desa Nglebak berada di lereng sebelah barat Gunung Lawu yang terletak pada ketinggian 975 mdpl. Luas wilayah Desa Nglebak adalah 23.443,05 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan menjadi fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Secara administratif wilayah Desa Nglebak terdiri dari 45 RT, dan 15 RW, meliputi 5 dusun dan 3 dukuh yaitu Dusun Krangean, Dusun Ngerso, Dusun Nglebak, Dusun Ngudal, Dusun Gondang, Dukuh Nglegok, Dukuh Somokado, dan Dukuh Bomo.

Tabel 2. Daftar Dusun/Dukuh di Desa Nglebak

No.	Dusun/Dukuh	Jumlah RT	Jumlah Rw
1.	Dusun Krangean	5	2
2.	Dukuh Somokado	6	2
3.	Dusun Ngerso	6	2
4.	Dusun Nglebak	6	2
5.	Dusun Ngudal	8	2
6.	Dukuh Nglegok	2	1
7.	Dusun Gondang	6	2

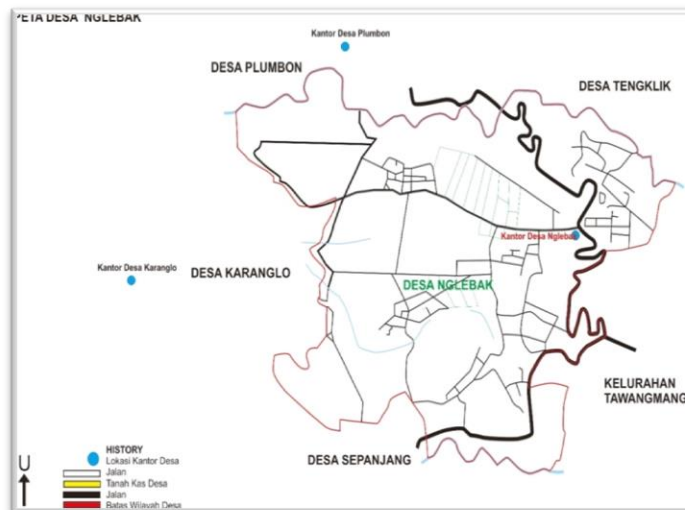
8.	Dukuh Bomo	6	2
----	------------	---	---

(Sumber : Kantor Kepala Desa Nglebak)

Desa Nglebak berjarak 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tawangmangu dan 26 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Desa Nglebak berjarak 126 km. Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Nglebak berada di sebelah barat pusat pemerintahan Kecamatan Tawangmangu. Desa ini memiliki batas wilayah antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tengklik
- Sebelah Selatan : Desa Sepanjang
- Sebelah Barat : Desa Karanglo
- Sebelah Timur : Kelurahan Tawangmangu

Gambar 1. Peta Desa Nglebak



(Sumber : Kantor Kepala Desa Nglebak)

Dengan luas wilayah yang relatif kecil, untuk mengelilingi seluruh wilayah Desa Nglebak dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor. Dimulai dari bagian paling utara Desa Nglebak ke bagian paling selatan bisa ditempuh dengan estimasi waktu 15-20 menit begitupula dari arah timur ke bagian

sisi barat Desa Nglebak dapat pula ditempuh menggunakan alat transportasi yang sama dengan estimasi waktu sekitar 20 menit.

2. Kondisi Topografis

Ditinjau dari segi topografis, Desa Nglebak merupakan wilayah yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 975 mdpl. Dikarenakan terletak di dataran tinggi, wilayah Desa Nglebak sebagian besar merupakan area persawahan dan pemukiman. Merujuk pada data dari BPS Kabupaten Karanganyar, jenis tanah yang tersebar di Kecamatan Tawangmangu merupakan jenis tanah kompleks andosol coklat, andosol kekuningan, dan litosol. Maka dari itu, didukung dengan jenis tanah dan wilayah dataran tinggi menyebabkan Desa Nglebak kaya akan hasil pertanian dan persawahan.

Area persawahan terbesar terletak disebelah timur selatan dan merupakan lahan persawahan yang sangat produktif sehingga mampu menunjang kesejahteraan para petani Desa Nglebak. Dikarenakan tanahnya yang subur, masyarakat Desa Nglebak telah banyak merasakan hasil dari adanya persawahan tersebut bahkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Nglebak. Di samping itu, saluran irigasi yang memadai juga mempengaruhi aktifitas para petani di Desa Nglebak. Berikut area atau lahan yang merupakan persawahan atau pertanian yang ada di Desa Nglebak.

Tabel 3. Daftar Luas Tanah Pertanian/Persawahan Di Kecamatan Tawangmangu

No.	Desa / Kelurahan	Tanah Bengkok (Ha)	Kas Desa (Ha)	Jumlah
1	Bandardawung	13.74	16.20	29.94
2	Sepanjang	616.61	6.52	623.13
3	Tawangmangu	-	-	-
4	Kalisoro	-	-	-
5	Blumbang	-	-	-

6	Gondosuli	17.31	12.05	29.36
7	Tengklik	16.41	11.07	27.48
8	Nglebak	41.57	10.70	52.27
9	Karanglo	16.65	37.90	54.55
10	Plumbon	16.25	17.18	33.43
	JUMLAH	738.54	111.62	850.16

(Sumber : Monografi Kecamatan Tawangmangu Tahun 2021)

Selain kaya akan lahan persawahan dan pertanian, Desa Nglebak memiliki sumber mata air dari dalam tanah yang terletak di antara Dusun Nglebak dan Dusun Ngudal. Sumber mata air tersebut dulunya diberi nama *Ngudalan*. Sumber mata air tanah adalah aliran air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alami, yang disebabkan oleh terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat dan keluar dari batuan. Pada umumnya mata air muncul di daerah kaki perbukitan atau bagian lereng, lembah perbukitan, dan di daerah dataran (Prastowo, 2008). Sumber mata air ini dahulunya digunakan untuk membantu mengairi pertanian dan persawahan di Desa Nglebak.

Infrastruktur yang ada di Desa Nglebak kurang lebih 80% fasilitas dalam kondisi layak. Jalan-jalan desa kurang lebih dari total panjang 4.343 m layak pakai atau memiliki akses yang mudah untuk transportasi sedangkan yang 844 m mengalami rusak ringan. Sedangkan untuk drainase atau saluran pembuangan mengikuti dari kondisi jalan akses yang ada yaitu 80% sudah bagus dan sisanya kurang lebih 20% perlu mendapatkan pembangunan kembali. Saluran irigasi persawahan 70 % sudah dalam kondisi bagus, sedangkan yang 30 % memerlukan pembangunan untuk kelancaran pengairan sawah-sawah yang ada guna meningkatkan produktifitas pertanian di Desa Nglebak. Saluran irigasi dapat di petakan menjadi tiga tempat; sebelah barat sepanjang kurang lebih 1200 meter baru terbangun 250 meter, sebelah tengah 1050 meter sudah terbangun 370 meter dan sebelah timur 700 meter belum terbangun.

3. Kondisi Demografis

Dilihat dari segi demografis, wilayah Desa Nglebak pada tahun 2021 memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.345,70 jiwa/km². Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Karanganyar penduduk Desa Nglebak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sampai 2021. Peningkatan penduduk tersebut seperti pada tahun 2019 sebanyak 5.082 jiwa, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 5424 jiwa, lalu pada tahun 2021 penduduknya mencapai 5499 jiwa. Pada tahun 2021, komposisi penduduk laki-laki di Desa Nglebak lebih banyak dari komposisi jumlah penduduk perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.784 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.715 Jiwa. (Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar)

Tabel 4. Daftar Laju Penduduk Di Kecamatan tawangmangu Menurut Desa

No.	Desa / Kelurahan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020		Kepadatan Penduduk (per km ²)		Rasio Jenis Kelamin
			(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Bandarawu ng	4.085	1.11	8.69	1,356	98.88	
2	Sepanjang	3.982	1.08	8.47	706	100.40	
3	Tawangmangu	8.891	0.56	18.92	2,635	99.08	

4	Kaliso ro	4.295	0.87	9.14	406	102.21
5	Blumb ang	4.162	1.29	8.86	374	101.06
6	Gondo suli	3.571	1.25	7.60	185	101.07
7	Tengkl ik	4.002	0.94	8.52	494	104.18
8	Ngleb ak	5.424	1.34	11.54	2,314	102.16
9	Karan glo	3.799	1.40	8.08	2,044	99.84
10	Plumb on	4.787	0.86	10.19	1,010	102.50
Tawa ngma ngu		46.99	1.01	100.00	671	100.97

(Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2021)

Untuk segi pendidikan, penduduk Desa Nglebak tersebar dalam beberapa lulusan dan yang paling banyak adalah tamatan Sd yang berjumlah 1.723 jiwa.

Tabel 5. Daftar Jenjang Tamatan Pendidikan Masyarakat Desa Nglebak

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	1.012
2.	Belum tamat SD	534
3.	Tamat SD	1.723
4.	Tamat SMP	1.013
5.	Tamat SMA	1.026

6.	Tamat D1-D2	14
7.	Tamat D3	54
8.	Tamat S1	116
9.	Tamat S2	3

(Sumber : Kantor Kepala Desa Nglebak)

Desa Nglebak merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Karanganyar sehingga memiliki jumlah penduduk penganut agama Islam yang banyak, Maka dari itu, penganut agama Islam di Desa Nglebak menjadi yang paling dominan dengan presentase 99,2%, jumlah penganut agama Kristen yaitu 0,67%, kemudian untuk penganut agama Katholik sebanyak 0,03%, penganut agama Hindu dengan jumlah 0,01%. Di Desa Nglebak tidak terdapat penganut agama Budha, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan. Maka dari itu, Desa Nglebak dapat disebut desa yang homogen dengan 99,2% masyarakatnya beragama Islam.\

Tabel 6. Daftar Penganut Agama Desa Nglebak

No.	Agama	Jumlah Penganut (jiwa)
1.	Islam	5459
2.	Kristen	37
3.	Katholik	2
4.	Hindu	1
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0
7.	Aliran Kepercayaan	0

(Sumber : Kantor Kepala Desa Nglebak)

Penduduk Desa Nglebak mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. total terdapat 926 jiwa penduduk Desa Nglebak yang bermata pencaharian sebagai petani. Untuk mata pencaharian yang lain seperti swasta memiliki jumlah 708 jiwa, wiraswasta berjumlah 629 jiwa jiwa, buruh tani berjumlah 225 jiwa, sebagai

PNS berjumlah 49 jiwa, dan TNI/Polri berjumlah 2 jiwa. Dengan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani menyebabkan perekonomian penduduk Desa Nglebak bergantung pada hasil panen.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Dari segi perekonomian, masyarakat Desa Nglebak mayoritas bekerja sebagai petani. Dapat dilihat bahwa Desa Nglebak merupakan desa yang memiliki lahan terluas untuk lahan sawah. Status kepemilikan lahan di Desa Nglebak yaitu tanah milik sendiri dan sewa. Petani di Desa Nglebak yang menyewa lahan biasanya menyewa tanah milik desa. Petani yang menjalankan usaha taninya dengan sistem sewa biasanya menyewa atau mengontrak tanah bengkok. Tanah bengkok merupakan tanah kas desa yang mana tanah tersebut dikelola desa untuk menambah tunjangan upah atau Kepala Desa atau perangkat desa (Ramadhanny, 2021). Namun demikian, perbandingan status kepemilikan lahan di Desa Nglebak yaitu lebih besar lahan milik sendiri dibandingkan dengan lahan sewa. Selain sebagai petani, terdapat beberapa usaha yang menjadi produk unggulan Desa Nglebak seperti, produsen rambak kulit, produsen bikang ambon, pengrajin kayu, pengrajin sangkar burung, dan produsen tempe.

Gambar 2. Kondisi Pertanian dan Persawahan Desa Nglebak Tahun 2023



(Sumber : Desa Nglebak 2023)

Selain itu, perekonomian Desa Nglebak sekarang ini juga didukung adanya tempat wisata yang dulunya hanya sumber mata air biasa. Desa Nglebak memiliki sumber mata air dari dalam tanah yang terletak di antara Dusun Nglebak dan Dusun Ngudal. Sumber mata air tersebut dulunya diberi nama *Ngudalan*. Sumber mata air tanah adalah aliran air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alami, yang disebabkan oleh terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat dan keluar dari batuan. Pada umumnya mata air muncul di daerah kaki perbukitan atau bagian lereng, lembah perbukitan, dan di daerah dataran (Prastowo, 2008).

Sumber mata air ini dahulunya merupakan sumber mata air yang dianggap *keramat* oleh masyarakat Desa Nglebak dan banyak mitos berkembang tentang sumber mata air ini, pasalnya sumber mata air ini memiliki air yang sangat jernih. Namun, sejak tahun 2020 sumber mata air ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang diberi nama *Umbul Udal-udalan*. Umbul udal-udalan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Nglebak dan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Nglebak. Dikarenakan memiliki air sangat jernih dalam perkembangannya sampai saat ini sudah dikelola dengan cukup baik, *umbul udal-udalan* mampu menarik minat para wisatawan baik lokal maupun dari luar Tawangmangu serta dapat diandalkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi warga Desa Nglebak.

Melihat dari segi sosial budayanya, Desa Nglebak memiliki dua tradisi yang menggabungkan antara konsep kepercayaan adat dengan agama Islam. Tradisi ini dinamai sebagai tradisi ruwahan dan tradisi nyandran. Tradisi ini dilaksanakan untuk menyambut bulan ramadhan. Ruwahan merupakan tradisi kebudayaan Jawa untuk mendoakan orang (kerabat) yang telah meninggal dan diikuti dengan pelaksanaan bersih desa. Bersih Desa merupakan *slametan* atau upacara adat Jawa untuk memberikan sesaji kepada danyang desa. Sesaji berasal dari warga untuk menyumbangkan makanan. Sedangkan tradisi nyandran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi mulai dari pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan kenduri yang di laksanakan di salah satu tempat ada yang di tempatkan

di masjid, mushola atau rumah Kepala Dukuh. Bagi warga yang beragama islam dengan membaca surat yasin atau tahlil saat berdoa di makam leluhur dan di saat genduri bersama.

Gambar 3. Kondisi Umbul Udal-udalan Tahun 2023



(Sumber : Desa Nglebak 2023)

5. Kondisi Pemerintahan

Melihat sejarah Desa Nglebak, pada jaman dahulu dipimpin oleh Demang bernama Ponco Suroto yang kemudian pada tahun 1958 digantikan oleh Samekto Hadi Sisworo sampai pada tahun 1966. Dalam sejarahnya setelah kepemimpinan Demang, Desa Nglebak di pimpin oleh Kepala Desa pertama yaitu Asmo Suyatno yang menjabat kepala desa mulai tahun 1966 sampai dengan 1974. Kemudian, digantikan oleh Pejabat Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa Nglebak bernama Sastro Sularno yang menjabat pada tahun 1974 sampai dengan 1989. Setelah itu, digantikan Padi Harto Supadmo yang menjabat pada tahun 1989 sampai dengan 1995 yang kemudian dilanjutkan oleh Mulyono tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Namun kemudian digantikan oleh Padi Harto Supadmo kembali pada tahun 2001 sampai dengan 2007, Kardi tahun 2007 sampai dengan 2013, Widodo,SP. tahun 2013 sampai dengan 2019, dan sampai saat ini pemerintahan dipegang oleh

Suparti yang masa jabatannya dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Melihat dari sejarahnya, kepemimpinan Suparti merupakan satu fase baru dalam sejarah Desa Nglebak yang dahulunya selalu dipimpin oleh kepala desa laki-laki.

Tabel 7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nglebak

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	Nasir Supriyadi, Spt
2.	Kepala Desa	Suparti
3.	Sekretaris Desa	Pujianto S.A.P
4.	Kaur Perencanaan	Sularno, S.Kom
5.	Kaur Keuangan	Endang Sulistyoningsih
5.	Kaur TU & Umm	Jarot Priyambudi
6.	Kasi Pemerintahan	Anik Sunarti, S.Pd
7.	Kasi Pelayanan	Supono
8.	Kasi Kesejahteraan	Alex Riyadi

(Sumber : Kantor Kepala Desa Nglebak 2023)

Pada kepemimpinan Suparti, Desa Nglebak memiliki visi yaitu “Menuju Masyarakat Desa yang Bertaqwa, Bermartabat, Makmur, dan Sejahtera”. Sedangkan untuk misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketaqwaan, berbudi pekerti luhur, dan berakhlakul karimah melalui remaja masjid dan gereja.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, efektif, dan efisien. Dudukung pua dengan peningkatan harmonisasi antara pemerintah desa, BPD, dan seluruh lembaga yang ada, sehingga tercipta sinergitas kinerja yang berdampak pada pembangunan desa.
3. Membangun pola kehidupan masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas program kesehatan, meliputi kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kader gizi & DS3, kebersihan lingkungan, dan pembangunan RTLH.

4. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA); termasuk didalamnya mencakup Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dalam masyarakat.
5. Meningkatkan pembangunan, baik perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur di Desa Nglebak berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang telah dirancang dan tertuang dalam RPJM Desa maupun RKP Desa.
6. Meningkatkan peran serta pemuda-pemudi dalam kegiatan pembangunan di segala bidang.
7. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, dan bersih serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

B. Profil Kepala Desa Nglebak

Pembahasan mengenai perempuan dan politik bukanlah hal yang baru yang ada di Indonesia. Meningkatnya partisipasi perempuan di dalam posisi-posisi strategis terutama dalam posisi sebagai eksekutif menjadi gerakan baru untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini juga dimaksudkan agar kepentingan-kepentingan perempuan yang selama ini cenderung kurang diperhatikan menjadi lebih terakomodir. Kehadiran calon kepala daerah perempuan dianggap mampu membawa perubahan terutama pembaharuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan yang selama ini masih kurang diperhatikan. Pada prinsipnya demokrasi haruslah menghadirkan keseimbangan politik individu yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dari sinilah muncul konsep *Politics of Presence* yang digagas oleh Anne Philips (1995), dimana kehadiran perempuan dalam politik memiliki dasar sebagai prinsip kesetaraan politik dimana tidak ada salah satu yang melebihi yang lain. Dalam arti lain, hal ini dimaknai bahwa kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dalam partisipasi politik memiliki porsi yang sama.

Peningkatan peran dan partisipasi politik perempuan terutama pasca bergulirnya Reformasi merupakan satu langkah positif dalam dinamika politik Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia pun menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki terutama dalam hal pemerintahan di tingkat lokal. Sudah banyak perempuan yang mampu menunjukkan kepada publik bahwa mereka layak untuk menempati posisi sebagai Kepala desa. Memasuki tahun 2019, pemilihan kepala desa kembali dilaksanakan salah satunya adalah di Desa Nglebak. Pilkades pada akhir tahun 2019 memunculkan satu fase baru di Desa Nglebak, hal ini dilatarbelakangi oleh terpilihnya Suparti sebagai kepala desa perempuan pertama di Desa Nglebak. Suparti dilantik resmi dilantik menjadi Kepala Desa Nglebak pada tahun 2020 Suparti merupakan tokoh perempuan etnis Jawa di Desa Nglebak. Suparti lahir di Karanganyar, 21 Juli tahun 1973. Ia lahir dari keluarga sederhana dari pasangan suami istri Samirah dan Sugeng Rahayu. Suparti memiliki dua saudara kandung. Sebagai seorang anak sulung dari tiga bersaudara, Suparti tumbuh dan besar di bawah didikan kedua orang tua pekerja keras dan memiliki disiplin tinggi sehingga karakter tersebut menurun ke Suparti dan menjadi ciri khas kepribadian Suparti dalam menjalani profesi sebagai kepala desa.

Selain itu, Suparti juga merupakan seorang istri dari Asep Rahmadi yangmana Asep adalah seorang pengusaha petani empon-empon. Sang suami berasal dari etnis Jawa dan lahir di Karanganyar. Suparti dan Asep memiliki dua orang anak perempuan yaitu Putri Hapsari yang sudah meninggal dan Nias Septiana. Suparti bukanlah sosok baru di kalangan masyarakat Desa Nglebak. Selain dikenal sebagai istri pengusaha empon-empon sebagai bahan obat, Suparti pernah dipilih menjadi ketua karang taruna Desa Nglebak pada tahun 2017-2018. Lalu Suparti juga pernah dipilih sebagai kader gizi posyandu di Desa Nglebak pada tahun 2016-2019.

Suparti menempuh pendidikan dasarnya di SDN 01 Tawangmangu pada tahun 1979 dan lulus pada tahun 1985. Setelah lulus ia melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun 1985 di SMP Penda Tawangmnagu pada tahun 1985 dan lulus

pada tahun 1988 dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta dan lulus pada tahun 1991. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas Suparti tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun Suparti bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Suparti pernah bekerja sebagai pedagang sayur melanjutkan usaha keluarganya. Setelah itu Suparti dipersunting oleh Asep Rahmadi dan mendirikan usaha bersama yang sampai saat ini masih berjalan.

BAB IV

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA NGLEBAK KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Bagian bab ini menjelaskan mengenai program pembangunan Desa Nglebak pada kepemimpinan Suparti. Terdapat beberapa program pembangunan yang banyak diperbincangkan dalam berbagai kalangan masyarakat. Karena selain memperbaiki tata kelola Desa Nglebak juga memberikan kemajuan terhadap Desa Nglebak. Peneliti membagi pembangunan yang dijalankan oleh Suparti menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Analisis program pembangunan ini dilakukan setelah melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dan untuk memperkuat hasil wawancara tersebut maka analisis program pembangunan dihasilkan dari dokumen maupun catatan pendukung.

A. Program Pembangunan Desa

Pembangunan desa seperti yang diatur dalam BAB VII UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Proses penting inilah yang menjadi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa tidak lepas dari proses dan tahapan yang harus dilalui. Pada proses tersebut yang terpenting adalah pelibatan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa ruang untuk diskusi public antara aparat pemerintah dengan masyarakat Desa Nglebak yaitu forum ruang publik, kepala Dusun, LPM, BPD, Musrenbang dan PKK.

Musrenbang ialah forum perencanaan (program) yang dilakukan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan yang lain Musrenbang desa biasanya dilaksanakan setiap bulan Januari dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP

Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa), dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawara dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa adalah lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. Namun di Desa Nglebak pelaksanaan musrenbang dilaksanakan pada akhir tahun, dimana pembahasan rapat yang dibahas tahun 2018 diperutukkan untuk tahun 2019, begitu terus selajutnya.

Pelaksanaan musrenbang di Desa Nglebak ini memang masih didominasi elit desa pada pengambilan keputusan. Musrenbang memiliki beberapa tahapan dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, serta dihadiri oleh perwakilan Dusun biasanya diwakili kepala dusun, BPD, LPM, dan perwakilan organisasi masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Suparti selaku kepala Desa Nglebak

“Musrenbang desa ini mengajukan ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, akhirnya tim dewan nanti yang memberikan keputusan mengenai perencanaan ini.. Musrenbang biasa dibiayai oleh ADD. Peserta yang hadir dalam musrenbang ini seluruh kaur, kepala dusun, BPD, LPM, dan perwakilan dari perempuan. Pada proses ini usulan-usulan program yang disampaikan oleh semua pihak termasuk kaur dan perwakilan perempuan itu semua di tamping oleh pemerintah desa. Kami tidak membatasi usulan dari perempuan karena itu merupakan hak mereka dalam berpendapat” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 5 April 2023)

“Perempuan disini alhamdulillah banyak yang kritis dalam pemerintahan. Mungkin karena banyak yang berprofesi sebagai guru atau karena di desa ini terdapat kades perempuan, jadi mereka percaya hawa pendapatnya akan di dengar oleh kades. Jadi jika ada perkumpulan

seperti musdes itu mereka mau menghadiri rapat.” (Wawancara Hari, Anggota BPD/ 5 April 2023)

Berdasarkan yang disampaikan kepala desa tersebut menyebutkan perempuan dalam peserta musrenbang. Perempuan di Desa Nglebak memang sering dilibatkan dalam musrenbang desa. Di Desa Nglebak beranggapan bahwa perempuan perlu terlibat dalam pengambilan keputusan. Pada forum diskusi PKK pertemuan rutin diselenggarakan tiap satu bulan sekali dengan cara yang bergilir tiap dusun. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan menyatukan kepentingan perempuan tiap dusun. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti pengajian dan arisan difasilitasi oleh PKK. Hal ini sudah menjadi keputusan bersama, seperti yang diungkapkan oleh narasumber.

“Keputusan waktu kegiatan PKK diputuskan bersama pada waktu pembentukan bahwa pelaksanaannya disepakati setiap bulannya pada tanggal 1. Kegiatan ini digilir disetiap dusun secara bergantian untuk menjaga tali silaturahmi“ (Wawancara SW, warga bisa/ 5 April 2023)

Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa anggota PKK berpartisipasi dalam forum diskusi untuk mencapai kata mufakat dan partisipasi tersebut termasuk dalam kategori partisipasi pikiran. Oleh karena itu, dalam partisipasi yang berupa non fisik (pikiran) perempuan sangat mendasar, terutama dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan narasumber.

“Pembangunan di Desa Nglebak ini salah satunya hasil dari kegiatan musrenbang,, cukup sering sih diundang dari PKK dan yang datang lumayan banyak. Biasanya usulan dari perempuan itu kami rebug dulu di forum PKK kemudian pada saat musrenbang kami utarakan usulan kami. Alhamdulillahnya ya banyak usulan yang terealisasi” (Wawancara G, warga biasa/ 5 April 2023)

Sebagaimana pengamatan yang dilakukan dapat ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat khususnya perempuan tidak hanya formalitas. Sebagaimana

pernyataan dari kepala Desa Nglebak, sebenarnya pimpinan desa sudah menyadari kehadiran dan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan desa seperti pada wawancara berikut ini.

“Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sangat penting mbak, ya karena rata-rata disini tingkat partisipasi perempuan dapat dibilang cukup baik. Kalo ada kegiatan gitu pasti laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat. Lah ini menandakan partisipasi perempuan sangat potensial sekali dalam pembangunan pedesaan. Sebenarnya ada banyak sekali peran perempuan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang sudah diatur dalam Permen desa No. 1 tahun 2015 di sana mengatur bagaimana melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Disini perempuan bisa mengambil peran banyak sekali seperti pembangunan, disamping PKK, dasawisma, posyandu, PAUD desa dan raskin”. (Wawancara Suparti, Kepala Desa/5 Februari 2023).

Dengan pernyataan tersebut menandakan bahwa Suparti sebagai Kepala Desa menyadari akan pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap pembangunan desa. Terlebih lagi Suparti yang merupakan perempuan, tentunya ingin menunjukkan bahwa perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dalam pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Ariadi, 2019). Pembangunan di bedakan menjadi dua yakni pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa

infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

B. Program Pembangunan Fisik Desa Nglebak

Sejak di tetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Di Desa Nglebak terdapat beberapa program pembangunan yang berfokus pada pekerjaan umum dan penataan runag yaitu pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan prasarana jalan desa yang meliputi gorong-gorong atau selokan atau parit atau drainase, kemudian pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan balai desa, pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa, dan yang terakhir pembangunan talud desa.

Tabel 8. Daftar Rencana Program Pembangunan Fisik Desa Nglebak

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Nglebak	Rp. 3000.000	PAD

2.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa Nglebak sepanjang 3.150m (Gorong-gorong/Selokan/Drainase)	Rp. 249.838.000	DD, PBK
3.	Pembangunan/Rehabilitas/Peninggkatan/Pengerasan jalan Desa Nglebak	Rp. 456.370.000	DD, PBP
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peninggkatan Balai Dusun /Balai Kemasyarakatan Dusun Ngerso	Rp. 100.000.000	PBK
5.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Rp. 40.000.000	DD
6.	Pembangunan Talud Jalan Desa Nglebak (10 Lokasi)	Rp. 282.493.000	DD

(Sumber: Dokumen RPJM Desa Nglebak)

Program pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu terpeliharanya jalan desa, terpeliharanya gorong-gorong dan selokan, lancarnya transportasi masyarakat, tersedianya balai desa untuk kegiatan, memudahkan pemantauan wilayah, memudahkan akses antar dusun dan desa, serta pengamanan dari bahaya longsor. Sehingga dengan terpeliharanya infrastruktur tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Dsa Nglebak serta kemudahan akses bagi masyarakat Desa Nglebak.

C. Program Pembangunan Non-Fisik Di Desa Nglebak

1. Bidang Pendidikan

Semenjak kepemimpinan Suparti, Desa Nglebak memiliki kemajuan sedikit demi sedikit salah satunya dalam bidang pendidikan. Dari data yang didapat penulis, terdapat pembangunan desa yang tercantum dalam RPJMDes berupa penyelenggaraan TK/PAUD dan oprasionalnya. Suparti mengaku pada saat kepemimpinan sebelumnya anak-anak usia 0-6 tahun kurang mendapat perhatian

dalam pendidikan dasar seperti untuk sekolah TK dan PAUD. Kualitas sumber daya manusia di desa penting untuk dibenahi sebagai upaya meningkatkan pendapatan penduduk miskin desa, menjamin akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar seperti pada saat wawancara dengan narasumber.

Tabel 9. Daftar Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan Desa Nglebak

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr asah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	Rp. 22.300.000	DD

(Sumber: dokumen RPJM Desa Nglebak)

“Saya disini sangat prihatin dengan kondisi anak-anak usia pendidikan dasar yang ingin bersekolah namun saat mendaftar malah tertolak karena kuotanya sudah penuh. Saya rasa kondisi tersebut dapat dibenahi karena untuk kondisi ekonomi setiap keluarga yang ingin mendaftarkan anaknya masuk ke jenjang pendidikan tergolong mampu. Jadi disini hambatannya hanya kuota penerimaan saja karena memang hanya memiliki ruangan yang kecil. Sehingga untuk permasalahan tersebut, solusinya adalah membangun ruang kelas dan memenuhi fasilitas dan alat untuk belajar mengajar.”
(Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

“ Sebelum kepemimpinan Bu Suparti dulu, pendidikan anak usia dini itu masih kurang. Dulu hanya terdapat dua PAUD yang mana koutanya sangat terbatas. Nah warga desa Nglebak terpaksa harus menyekolahkan anaknya di beda Desa yang pastinya lumayan jauh. Namun kemudian, melihat masalah tersebut Ibu (Suparti) setelah menjadi Kepala Desa langsung

merencanakan untuk membangun desa bidang pendidikan ini khususnya untuk anak usia dini. Dan Alhamdulillah program ini berjalan lancar. Sekarang sudah ada tiga PAUD dengan kapasitas yang memadai untuk menampung anak-anak usia dini di Desa Nglebak” (Wawancara Nasir Supriyadi, Ketua BPD/ 12 Februari 2023)

Atas dasar permasalahan tersebut, Suparti pun berupaya untuk memajukan desa di bidang pendidikan dengan dukungan dari berbagai pihak perlu memberikan dan mempermudah akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat desa, termasuk pendidikan anak usia dini. Terdapat target yang cukup optimis yang digagas oleh Suparti yaitu untuk semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan desa.

2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Di Desa Nglebak program dibidang kesehatan terdiri dari tiga program, yaitu penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu, pengasuhan bersama/ bina keluarga bersama.

Tabel 10. Daftar Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan Desa Nglebak

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan Poskesdes (Terselenggaranya Program KB)	Rp. 5000.000	DD
2.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 14. 400.000	DD

	untuk Gizi Balita		
3.	Pengasuhan Bersama atau Bina keluarga Bersama (BKB)	Rp. 10. 200.000	DD

(Sumber: Dokumen RPJM Desa Nglebak)

Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, merupakan program yang ditetapkan oleh Suparti atas dasar keinginan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa karena kepedulian masyarakat Desa Nglebak tentang kesehatan sebelumnya masih kurang terutama pada ibu hamil. Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan (Kementrian Kesehatan RI, 2012).

“Poskesdes ini sebenarnya adalah program lanjutan yang sudah dilaksanakan pada kepemimpinan sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah pada program ini ibu hamil juga diikutsertakan. Tidak hanya pada posyandu juga, namun pada poskesdes. Kami dari pemerintah desa ingin menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa karena kepedulian masyarakat Desa Nglebak tentang kesehatan sebelumnya masih kurang terutama pada ibu hamil. Jadi misalnya ibu hamil ini tidak mau datang saat posyandu, masih ada poskesdes yang dapat menampung istilahnya poskesdes ini dapat menjadi alternative bagi ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya dan berkonsultasi pada tenaga medis.” (wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

Kegiatan Poskesdes di Desa Nglebak, utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kesehatan anak

dan pengamatan dan program KB. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan di Poskesdes didukung dengan pencatatan dan pelaporan.

Program di bidang kesehatan berikutnya adalah program penyelenggaraan posyandu. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan disuatu wilayah kerja Puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, maupun tempat-tempat lain yang mudah didatangi oleh masyarakat. Suparti mengatakan bahwa Posyandu merupakan langkah yang cukup strategis dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya. Peningkatan pembinaan posyandu sebagai pelayanan untuk balita dan kesehatan yang dikelola untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dari petugas perlu tumbuh kembangkan perlu serta aktif.

“Pada program posyandu ini bertujuan untuk melayani balita seperti memberikan imunisasi dan timbang berat badan, diselenggarakan juga posyandu remaja dan posyandu lansia untuk memberikan pelayanan terhadap remaja maupun lansia. Program ini juga merupakan program lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya yang bertujuan untuk menaikkan taraf kesehatan masyarakat Desa Nglebak.” (Wawancara Suparti, Kepala desa / 10 Februari 2023)

Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita seperti memberikan imunisasi dan timbang berat badan, posyandu remaja dan posyandu lansia. Posyandu diadakan setiap satu bulan sekali di masing-masing dusun/dukuh yang ada di wilayah Desa Nglebak dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu juga memberikan edukasi dan pedoman kepada para ibu hamil dan ibu menyusui serta memberikan vaksinasi dan makanan suplemen kepada bayi dan balita. Kegiatan posyandu juga menjadi media deteksi dini terkait dengan kasus-kasus malagizi dan kekurangan gizi pada bayi dan balita.

Program di bidang kesehatan berikutnya adalah pengasuhan bersama/ bina keluarga balita. BKB atau Bina Keluarga Balita merupakan suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal, BKB ini tidak sama dengan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau pun TPA karena sasaran dari BKB adalah keluarga/orang tua yang memiliki anak balita usia 0-5 tahun. Suparti mencanangkan program BKB atas dasar realitas bahwa di Desa Nglebak masih banyak anak usia balita yang terdata masih kekurangan gizi. Hal itu dikarenakan banyak para ibu hamil kurang memperhatikan gizinya saat masih mengandung. Pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan seperti misalnya program-program perbaikan kesehatan dan gizi untuk ibu dan anak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap orang tua serta anggota keluarga untuk mempersiapkan pendidikan anak usia 0-5 tahun dalam rangka menumbuh kembangkan kecerdasan balita. Sebagai orang tua baru atau orang tua muda banyak diantara saudara kita yang belum memahami pola asuh dan tumbuh kembang anak yang baik. Dengan mengikuti program ini dapat memberikan manfaat positif yaitu menjadikan orang tua lebih pandai mengurus dan merawat anak, pandai membagi waktu dan mengasuh anak, bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak, serta meningkatnya keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anak balita.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pasal 126 dengan tujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan Serta kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, perhatian secara khusus pemerintah diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi tertera pada ayat 1 pemberdayaan masyarakat desa (Solekhan, 2014). Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi pariwisata dengan

pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua potensi pengembangan sumber daya alam yang dapat dijadikan program pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan sumber mata air yang berada di Dusun Ngudal dan pengembangan sumber daya alam di Bukit Ngudal. Dengan adanya dua potensi tersebut, Suparti sebagai Kepala Desa berusaha untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola dua potensi tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat Desa Nglebak sendiri. Maka dari itu, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan program pembinaan untuk memberdayakan masyarakat Desa Nglebak, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Daftar Rencana Pembangunan Bidang Pemberdayaan Desa Nglebak

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Umbul Udal-udalan dan Gunung Ngudal)	Rp. 500.000.000	DD
2.	Pembinaan PKK (8 Dukuh)	Rp. 10.000.000	PAD

(Sumber: Dokumen RPJM Desa Nglebak)

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Desa Nglebak memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah sumber mata air dari dalam tanah yang terletak di antara Dusun Nglebak dan Dusun Ngudal. Sumber mata air tersebut dulunya diberi nama *Ngudalan*. Sumber mata air tanah adalah aliran air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alami, yang disebabkan oleh terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat dan keluar dari batuan. Pada umumnya mata air muncul di daerah kaki perbukitan atau bagian lereng, lembah perbukitan, dan di daerah dataran (Prastowo, 2008). Sumber mata air ini dahulunya digunakan untuk membantu mengairi pertanian dan persawahan di Desa Nglebak.

Dikarenakan sumber air tersebut dirasa memiliki potensi yang baik, maka sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Sejak tahun 2020 sumber mata air ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang diberi nama *Umbul Udal-udalan*. Umbul udal-udalan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Nglebak dan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Nglebak. Umbul udal-udalan memiliki air yang sangat jernih, dalam perkembangannya sampai saat ini sudah dikelola dengan cukup baik *umbul udal-udalan* mampu menarik minat para wisatawan baik lokal maupun dari luar Tawangmangu serta dapat diandalkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi warga Desa Nglebak. Sehingga dalam RPJMDes, pengembangan Umbul Udal-udalan menjadi salah satu program pembangunan utama untuk meningkatkan pendapatan desa.

“Dua fokus pemberdayaan yang ada di Desa Nglebak itu pengembangan Umbul udal-udalan dan pemberdayaan ibu-ibu PKK. Dua program tersebut dicanangkan agar dapat memberikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Desa Nglebak. Dikarenakan beberapa keluarga yang ada di Desa Nglebak, yang oranag tuanya petani itu anaknya justru tidak ingin melanjutkan pekerjaan petani seperti orang tuanya. Kami piker dengan adanya program pengembangan Umbul Udal-udalan dan pengembangan keterampilan ibu-ibu PKK mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Toh dua program tersebut sangat potensial untuk dikerjakan.” (Wawancara Suparti, Kepala Desa, 21 Maret 2023)

“Dari dulu sumber mata air yang sekarang sudah menjadi umbul itu dianggap keramat mbak, biasanya orang-orang desa melaksanakan adat “Padusan” itu berenang di sekitar sumber mata air tersebut menjelang bulan ramadhan. Namun, Bu Suparti melihat terdapat potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Karena dalam perkembangannya, konteks keramat itu sudah mulai hilang. Kemudian, Bu Suparti meminta izin pada para tokoh agama dan tokoh sesepuh yang biasanya mengurus sumber mata air tersebut. Dan

ternyata mendapatkan izin. Ya sekarang jadilah umbul udal-udalan yang lumayan ramai pengunjung” (Wawancara Hari, Anggota BPD/ 12 Februari 2023)

“Pada perencanaannya sumber mata air itu merupakan hal yang baru, pada kepemimpinan sebelumnya tidak ada yang menginisiasi bahwa sumber mata air tersebut dapat dijadikan wisata. Saya ikut senang karena Desa Nglebak jadi ramai pengunjung. Apalagi bisa berjualan di sekitar tempat tersebut. Mungkin hal tersebut merupakan strategi Ibu Suparti untuk memajukan perekonomian desa saat menjadi Kepala Desa dan saya kira hal tersebut sudah cocok dengan masyarakat Desa Nglebak.” (Wawancara Widodo, warga biasa/ 14 Februari 2023)

Selain pengembangan umul udal-udalan, program pemberdayaan yang ada di Desa Nglebak yaitu pemberdayaan perempuan melalui PKK, pemberdayaan masyarakat melalui festival kesenian adat atau kebudayaan dan pemberdayaan pemuda melalui karangtaruna. Namun, peneliti hanya memfokuskan program pemberdayaan pada pemberdayaan Umbul Udal-udalan dan pemberdayaan perempuan melalui PKK. Pemberdayaan perempuan melalui PKK diinisiasi oleh Suparti karena melihat bahwa perempuan berhak mendapatkan pelatihan agar dapat mengembangkan potensi diri sendiri. Pemerintah desa dapat memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk perempuan dengan tujuan agar kesejahteraan perempuan di Desa Nglebak dapat meningkat.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA YANG DIJALANKAN OLEH SUPARTI

Bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana Suparti sebagai Kepala Desa Nglebak menjalankan program pembangunan desa, mengingat pada setiap pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Dalam bab ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana aspek analisa gender dalam pengarusutamaan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat masuk dalam setiap pembangunan desa. Data yang diperoleh berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan pihak aparat desa terkait, serta masyarakat Desa Nglebak dan juga berdasarkan sumber literatur yang sesuai sehingga menunjang penelitian ini. Lalu data yang sudah tersedia dianalisis menggunakan teori yang diadopsi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional sehingga penulisan kajian ini lebih sistematis.

A. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Yang Responsif Gender Di Desa Nglebak

Pada Bab empat telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa program pembangunan fisik yang berfokus pada pekerjaan umum dan penataan ruang. Dari program-program yang dicanangkan Suparti di dalam RPJM Desa yang dijelaskan pada BAB empat diatas, program-program dibidang pembangunan fisik selama menjabat dua setengah tahun ini setidaknya Suparti sudah merealisasikan beberapa pembangunan seperti pembangunan balai Desa di dusun ngerso, dan pemeliharaan jalan dan penerangan desa, pembangunan jalan penghubung antar dusun dan dukuh, lebih jelas dalam tabel berikut.

Tabel 12. Daftar Realisasi Pembangunan Fisik Desa Nglebak

No.	Nama Kegiatan	Status
1.	Pemeliharaan Jalan Desa Nglebak	Terealisasi 70%
2.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa Nglebak sepanjang 3.150m (Gorong-gorong/Selokan/Drainase/Penerangan Jalan)	Terealisasi
3.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa Nglebak	Terealisasi
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Dusun Ngerso	Terealisasi
5.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Terealisasi
6.	Pembangunan Talud Jalan Desa Nglebak (10 Lokasi)	Terealisasi

(Sumber : LPJ Desa Nglebak Tahun 2020-2022)

Selain pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa terdapat pembangunan lainnya di Desa Nglebak. Pembangunan tersebut termuat dalam laporan realisasi Desa Nglebak tahun 2022 yaitu pembangunan penerangan jalan umum dengan solar sel Dusun Ngerso, pembangunan saluran tersier timur lapangan Desa Nglebak, pengaspalan depan kantor Desa Nglebak, pembangunan gedung serba guna Dukuh Krangean, pelebaran jalan Dukuh Bomo, dan beberapa pembangunan lainnya.

Gambar 4. Realisasi pembangunan jalan penghubung Dusun Ngudal dengan Dusun Nglebak



(Sumber : Desa Nglebak Tahun 2023)

Gambar 5. Realisasi pembangunan jalan penghubung Dusun Ngudal dan Dukuh Bomo



(Sumber : Desa Nglebak Tahun 2023)

Realisasi pembangunan infrastruktur dari pemerintah Desa Nglebak dilakukan bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri masyarakat pedesaan yang membangun wilayahnya secara gotong royong. Masyarakat merupakan pelaksana utama dalam pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berasal dari pemerintah desa. Pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Suparti sebagai kepala desa mengaku bahwa dalam pelaksanaannya didominasi oleh laki-laki seperti saat

memperbaiki jalan-jalan di desa, memperbaiki gorong-gorong atau selokan di desa, pada saat memperbaiki jembatan di desa, dan lain-lain seperti pada wawancara dengan narasumber

“Dalam pelaksanaannya pembangunan jalan dan jembatan memang didominasi oleh laki-laki. Namun, pembuatan jalan dan jembatan tersebut dapat bermanfaat juga untuk perempuan. Perempuan disini berpartisipasi pada proses perencanaan yang dilaksanakan saat musyawarah desa. Jadi partisipasi laki-laki pada saat membangun jalan, kemudian partisipasi perempuan ada saat perencanaan. Pembangunan infrastruktur disini dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel..” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023).

Suparti mengungkapkan terlaksananya pembangunan fisik ini cukup progresif dikarenakan elit politik dan masyarakat Desa Nglebak dapat bekerja sama dengan baik. Namun, tidak semua tokoh masyarakat setuju dengan beberapa pembangunan yang dicanangkan. Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang harus diajak berkompromi kembali oleh Suparti. Proses negosiasi yang dilakukan oleh Suparti adalah membujuk kembali tokoh masyarakat tersebut secara berkala dan perlahan dengan kembali memberikan penjelasan tentang manfaat pembangunan tersebut. Mengingat bahwa tokoh masyarakat tersebut merupakan sesepuh Desa Nglebak. Setelah proses negosiasi membuahkan hasil yang positif, maka pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana pembangunan. Dalam menghadapi hambatan terkait pembangunan, Suparti sebagai Kepala Desa sering berkonsultasi dengan sekretaris desa dan pendamping desa. Suparti mengatakan bahwa dengan adanya pendamping desa, melebarkan wawasan pembangunan desa. Palsanya pendamping desa tersebut sering memberikan saran kreatif untuk membangun beberapa fasilitas di desa yang sebelumnya belum pernah dipikirkan.

“ Pro dan kontra dalam setiap kegiatan itu pasti ada dan menurut saya sudah sewajarnya seperti itu. Saya disini sebagai pihak penengah harus mengambil jalan terbaik untuk desa. Maka, jika ada yang kurang setuju dengan pelaksanaan pembangunan ya saya perlahan-lahan menjelaskan kembali. Istilahnya ngarih-arih (membujuk dengan pelan), toh kedepannya pasti bermanfaat bagi masyarakat. Saya dan pak carik selalu seperti itu, menjelaskan kembali seberapa pentingnya pembangunan ini dan bagaimana manfaat kedepannya. Dengan cara seperti itu, feedback positif datang dengan sendirinya” (Wawancara Suparti, Kepala Desa, 21 Maret 2023)

“Biasanya kasus yang perlu dibicarakan kembali atau dinegoisasi ini adalah rehabilitasi atau pembangunan kembali jembatan. Beberapa tokoh yang tidak setuju juga biasanya sesepuh. Mereka mengkhawatirkan akan terjadi suatu musibah jika jembatan tersebut dibangun kembali. Untuk mendapatkan persetujuannya, kami berkompromi agar menemukan jalan keluar dan mendapatkan persetujuan untuk pembangunan tersebut.” (Wawancara Pujiyanto, Sekertaris desa, 21 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaan pembangunan, Suparti memilih jalan untuk berkompromi. Suparti memilih jalan tengah untuk bernegoisasi dengan membujuk pihak yang berlawanan pendapat dirasa cukup efektif. Menurutnya dengan cara membujuk seperti yang dijelaskan diatas, dapat memperoleh respon positif dengan cepat. Sehingga, proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.

“Ternyata pada bulan Maret pandemi covid-19 menghampiri hampir seluruh pelosok negeri. Karena itu, maka ada beberapa kegiatan yang terhenti, dari mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, hingga yang sudah matang direncanakan yaitu pembangunan BUMDes Udal-udalan” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara diatas Suparti mengaku bahwa mulai pada bulan April tahun 2020, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sedikit terhambat karena adanya pandemi covid-19. Sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tertunda dan anggaran yang dialihkan untuk penanganan saat pandemi covid-19 sampai pada saat kebijakan PSBB sedikit memiliki kelonggaran yaitu pada bulan September tahun 2020.

B. Pelaksanaan Pembangunan Non Fisik Responsif Gender Di Desa Nglebak

1. Bidang Pendidikan

Semenjak kepemimpinan Suparti sebagai Kepala Desa Nglebak, pendidikan tingkat dasar mulai diperhatikan kembali. Suparti mengaku pada saat kepemimpinan sebelumnya, anak-anak usia 0-6 tahun kurang mendapat perhatian dalam pendidikan dasar seperti untuk se kolah TK dan PAUD. Meskipun di Desa Nglebak sudah terdapat dua TK dan tiga PAUD yaitu Di Desa Nglebak terdapat tiga PAUD yaitu PAUD Mawar Putih yang berada di Dusun Krangean, PAUD Cahaya yang terletak di Dusun Nglebgok, serta PAUD Mutiara yang terletak di Dusun Gondang. Untuk TK, Desa Nglebak memiliki dua TK yang terletak di Dusun Krangean dan Nglegok. Namun, kuota penerimaan muridnya hanya sedikit dikarenakan keterbatasan alat untuk belajar mengajar. Kemudian Suparti mencantumkan program penyelenggaraan TK/PAUD dalam RPJMDes dan mendapatkan dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 22. 300.000.

“Pada kepemimpinan sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan dasar untuk anak usia dini tidak terlalu diperhatikan. Pembangunan desa berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mana memang pada saat itu sebagian besar jalan yang ada di Desa Nglebak rusak sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat Desa Nglebak. Kurang lebih dari tahun 2017-2019 itu penganggaran berfokus pada perbaikan jalan dan jembatan sehingga kurang memperhatikan bidang pendidikan” (Wawancara Suparti, Kepala Desa, 10 Februari 2023).

“Memang pada tahun 2017 itu banyak sekali jalan yang diperbaiki, mulai dari jalan penghubung antardusun, waktu itu yang paling parah adalah jalan penghubung Dusun Ngudal dan Dusun Bomo. Namun saat ini jalan sudah enak untuk dilewati.” (Wawancara Rusli, warga biasa/ 19 Februari 2023)

Gambar 6. PAUD Mawar Putih dan PAUD Cahaya



(Sumber : profil Desa Nglebak Tahun 2023)

Gambar 7. PAUD Mutiara



(Sumber : Profil Desa Nglebak Tahun 2023)

Gambar 8. TK 01 dan 02 Dsa Nglebak



(Sumber : profil Desa Nglebak Tahun 2023)

Kemudian untuk analisis gender dalam pelaksanaan program penyelenggaraan TK/PAUD yaitu dalam menjalankan aspek akses dalam penyelenggaraan TK/PAUD dapat dilihat dari seberapa besar peluang anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan memperoleh manfaat yang sama dalam penyelenggaraan TK/PAUD. Dalam implementasi penyelenggaraan TK/PAUD, perempuan dan laki-laki mendapatkan peluang yang sama dan setara dengan terpenuhinya fasilitas mulai dari akses jalan menuju PAUD/TK, tenaga pendidik, mata pelajaran, ruang kelas, alat untuk pembelajaran, permainan dan toilet, seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber.

“Untuk laki-laki dan perempuan di PAUD ini mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pendidikan dasar yang sama, mereka belajar bersama dalam satu ruangan oleh guru yang sama dan mendapatkan mata pelajaran yang sama. Untuk permainan, saya rasa unisex mbak di PAUD ini, ada sejumlah permainan kata, permainan warna, dan bahkan ada permainan tradisional. Untuk pemenuhan fasilitas PAUD seperti toilet juga sama mbak, terdapat empat toilet untuk masing-masing dua laki-laki dan dua perempuan. Saya rasa itu cukup untuk anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan di PAUD ini.” (Wawancara Sri Wahyuni, warga biasa/10 Februari 2023)

“Kalau di PAUD ini saya rasa tidak ada kesenjangan fasilitas mbak, baik mata pelajarannya, dalam memperoleh seragam untuk sekolah, permainan di

luar dan di dalam kelas, dan pemisahan untuk toiletnya anak laki-laki dan perempuan setara. Tidak dibida-bedakan atas jenis kelamin.” (Wawancara Finayanti, warga biasa/10 Februari 2023)

Pada aspek partisipasi, yaitu keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan dalam penyelenggaraan TK/PAUD seperti pada kegiatan lomba yang diikuti oleh setiap anak, kegiatan untuk memperingati hari-hari besar seperti hari kartini, hari ibu, dan lain-lain, serta kegiatan piknik dapat dikatakan setara antara laki-laki dan perempuan seperti pada wawancara dengan narasumber.

“Disini anak laki-laki sama perempuan mendapat perlakuan yang sama mbak, untuk lomba-lomba pun anak laki-laki dan perempuan mengikuti semua. Baik lomba membaca dan menulis, lomba menggambar, lomba untuk hari kartini, semuanya mendapat syarat yang sama. Saya rasa dalam pemenuhan pendidikan dasar juga mendapat peluang yang sama mbak.” (Wawancara Nimas Apriliya, warga biasa/ 10 Februari 2023)

“Untuk pemenuhan akses, dari mulai pendidikan dasar pengetahuan umum, pendidikan dasar untuk bersikap dan bersosial sampai pada lomba, anak-anak baik laki-laki dan perempuan kami cukupi kesetaraannya mbak. Lalu untuk fasilitas seperti ruang kelas yang tidak bersekat antara laki-laki dan perempuan, permainan dalam ruangan dan luar ruangan yang memiliki sifat unisex jadi anak laki-laki maupun perempuan semua bisa menggunakannya, dan untuk toilet telah dibangun empat yaitu dua untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Kami berusaha untuk menyukupi hak yang harus didapatkan anak laki-laki maupun perempuan dalam kadar yang sama.” (Wawancara Ema, guru PAUD/10 Februari 2023)

Sedangkan dalam aspek manfaat yaitu peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil kebijakan penyelenggaraan TK/PAUD ini, masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai anak usia 0-6 tahun dapat mendaftarkan anaknya untuk mendapat pendidikan dasar di TK/PAUD Desa Nglebak. Di Desa Nglebak terdapat tiga PAUD dan dua TK

sehingga memudahkan masyarakat Desa Nglebak memperoleh pendidikan dasar. Aspek manfaat juga dapat dijelaskan dalam rata-rata lama sekolah di kecamatan tawangmangu yang semakin meningkat.

Tabel 13. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun 2020-2022)

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kecamatan Tawangmangu	13,68	13,69	13,70

Sumber : Kecamatan Tawangmangu 2023

Tabel 14. Rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin (tahun) 2020-2022

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kecamatan Tawangmangu	9,30	9,31	9,32	7,74	7,91	7,93	8,50	8,51	8,52

Sumber : Kecamatan Tawangmangu 2023

Dari data diatas, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Rata-Rata Lama Sekolah di Kecamatan Tawangmangu selalu meningkat. Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa ditahun 2022, Kecamatan Tawangmangu memiliki nilai tertinggi degan angka 8,52. Meskipun secara angka mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dapat dikatakan angka diatas masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kecamatan Tawangmangu dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Lebih jauh hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat kedepan yang mencanangkan peningkatan sumber daya manusia yang unggul untuk dapat bersaing di era revolusi industry 4.0 ini.

Untuk mendorong pembangunan pendidikan ini, Suparti mengatakan bahwa tidak terdapat hambatan selama pelaksanaannya. Berbeda dengan masalah

pembangunan jalan yang memiliki perbedaan pendapat, untuk pembangunan bidang pendidikan tidak terdapat hambatan. Maka untuk mendorong terealisasinya program bidang pendidikan, Suparti hanya perlu meluruskan tujuan bersama dengan tenaga pendidik tingkat PAUD/TK agar pelaksanaannya lancar dan sesuai dengan tujuan awal.

2. Bidang Kesehatan

Di Desa Nglebak program dibidang kesehatan terdiri dari tiga program, yaitu penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu, pengasuhan bersama/ bina keluarga bersama. Pada RPJMDes terdapat dana Rp. 5.000.000 untuk terselenggaranya program KB, Rp. 14.400.000 untuk program gizi balita dalam Penyelenggaraan Posyandu, dan Rp. 10.200.000 untuk Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita. Namun, Suparti menjelaskan bahwa terdapat hambatan saat melakukan kegiatan Posyandu di tahun 2020 karena adanya peningkatan kasus Covid-19. Suparti menambahkan dana yang tersedia memang sebagian dialihkan untuk protokol kesehatan seperti pada wawancara.

“Kegiatan posyandu ini sempat berhenti satu sampai dua bulan mbak, karena adanya pandemi Covid-19 dimana protokolnya tidak boleh berkerumun. Mengingat sasaran untuk kegiatan posyandu adalah balita yang mana balita tersebut masih sangat rentan dengan penyakit. Jadi mau tidak mau, kami pemerintah desa dan kader posyandu melati sementara saat itu berhenti melakukan pengecekan kesehatan untuk balita. Namun, kami tetap berusaha menyalurkan vitamin dan obat yang dibutuhkan kepada masyarakat Desa Nglebak. Karena saat itu penerapan protokol kesehatan menjadi bagian penting dalam kegiatan sehari-hari, kader posyandu berkeliling pada setiap rumah agar tidak menimbulkan kerumunan.”
(Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

Dilihat dari segi aspek akses, baik laki-laki maupun perempuan terdapat kesamaan peluang untuk memperoleh manfaat yang sama atas penyelenggaraan POSKESDES ini misalnya pada program “Lingkungan sehat, mari imunisasi, dan pemberian makanan tambahan”. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam program tersebut tanpa adanya batasan. Kemudian untuk aspek partisipasi, tenaga kesehatan sudah sering melakukan sosialisasi dan mendapat respon positif dari masyarakat di Desa Nglebak baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, mereka mendukung program yang dijalankan dalam penyelenggaraan pos kesehatan. Masyarakat Desa Nglebak tidak hanya mendengarkan sosialisasi saja, namun mereka melaksanakan program dengan baik. Contohnya saja program lingkungan sehat, dalam program lingkungan sehat bisa dikatakan sudah berjalan 80% karena masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan bahkan terdapat pembangunan Bank Sampah yang diusulkan oleh masyarakat Desa dalam Musyawarah desa. Seperti pada wawancara.

“Warga Desa Nglebak mayoritas sudah tidak lagi buang sampah di sungai atau selokan mbak. Sudah disosialisasikan juga dari ketua RT jika membuang sampah sebaiknya di tempat penampungan sampah agar sungainya menjadi bersih. Belum lama ini juga pemerintah desa membangun bank sampah, tetapi memang belum ada yang mengurus karena masih baru.”
(Wawancara Ari, warga biasa/ 7 Februari 2023)

Selain itu, imunisasi dan cek kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga medis dalam pos kesehatan desa terbilang lancar. Kunci utama banyaknya masyarakat yang berpartisipasi adalah tenaga medis sering melakukan sosialisasi untuk masyarakat Desa Nglebak. Namun dalam kegiatan cek kesehatan oleh pos kesehatan desa, mayoritas yang berpartisipasi adalah perempuan. Tenaga medis dalam hal ini adalah bidang desa menyebutkan bahwa laki-laki terutama yang berusia 40 tahun ke atas tidak terlalu menganggap penting untuk urusan cek

kesehatan. Maka dari itu, sering kali yang melakukan cek kesehatan adalah kaum ibu-ibu seperti pernyataan narasumber dari wawancara.

“Seringnya yang datang ke pos kesehatan untuk pengecekan kesehatan itu ibu-ibu mbak. Laki-laki lebih memilih mengurus ladang daripada untuk datang ke pos kesehatan. Bahkan saat musim panen sudah tiba, seperti saat musim panen ketela kemarin. Hanya beberapa saja yang berpartisipasi dalam pos kesehatan. Mengingat di Desa Nglebak itu bertani adalah pekerjaan utama.” (Wawancara Nina Agustin, Bidan Desa/ 5 Februari 2023).

“Sebenarnya kami warga desa bersyukur ada program untuk cek kesehatan, apalagi gratis mbak. Saya juga sering datang saat sosialisasi dan kegiatan cek kesehatan. Tetapi, kadang jika ada pekerjaan yang tiak bisa ditinggalkan seperti jualan atau panen ya mau gimana lagi mbak, emaman” (Wawancara Dami, warga biasa/ 7 Februari 2023)

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan warga dan tenaga medis desa sebenarnya sudah bersinergi dalam mewujudkan program “Lingkungan sehat, mari imunisasi, dan pemberian makanan tambahan”. Namun, karena masyarakat Desa Nglebak umumnya bermatapencarian sebagai petani maka jika ada panen hasil bumi mereka memilih untuk tidak menghadiri kegiatan yang diselenggarakan.

b. Penyelenggaraan Posyandu Dan Pengasuhan Bersama/ Bina Keluarga Bersama

Penyelenggaraan posyandu diadakan di Posyandu Melati yang berada di sebelah utara SD Negeri 1 Nglebak. Pemerintah Desa Nglebak bersama Kader posyandu melati mengadakan kegiatan rutin setiap satu bulan sekali. Kegiatan Posyandu Ini meliputi Pengukuran Berat dan Tinggi Badan serta Peningkatan Gizi, Imunisasi, Pemberian Makanan Tambahan dan Penanggulangan Diare. Penimbangan Balita: Penimbangan balita dilakukan tiap bulan di posyandu untuk Pemantauan Pertumbuhan dan Mendeteksi sedini mungkin penyimpangan

pertumbuhan balita. Dari penimbangan yang kemudian dicatat di KMS dari data tersebut dapat diketahui pertumbuhan balita. KMS adalah kartu untuk mencatat dan memantau perkembangan balita dengan melihat garis pertumbuhan berat badan anak dari bulan ke bulan pada KMS dapat diketahui status pertumbuhan anaknya. Selanjutnya yaitu imunisasi di posyandu. Balita akan mendapatkan layanan imunisasi. Macam imunisasi yang diberikan di posyandu Desa Nglebak adalah:

- BCG untuk mencegah penyakit TBC.
- DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, (batuk rejan), tetanus.
- Polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan.
- Hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B (penyakit kuning).

Masyarakat berpendapat bahwa peningkatan gizi balita dengan adanya posyandu yang sasaran utamanya bayi dan balita sangat tepat untuk meningkatkan gizi balita. Peningkatan gizi balita di posyandu yang dilakukan oleh kader berupa memberikan penyuluhan tentang ASI, status gizi balita, MPASI, Imunisasi, Vitamin A simulasi tumbuh kembang anak, diare pada balitas seperti yang dijelaskan narasumber pada saat wawancara.

“Kami selaku orang tua dari anak-anak yang berusia balita sangat menikmati adanya kegiatan posyandu ini. Selain menjaga kesehatan bayi, kami para ibu-ibu dapat saling berbagi pengalaman saat bertemu di posyandu serta menanyakan keluhan-keluhan anak kepada tenaga medis yang bertugas biasanya bu bidang juga ikut. Saya sebisa mungkin selalu hadir dalam kegiatan ini karena kegiatan posyandu ini sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak saya” (Wawancara Ratna, warga biasa/ 7 Februari 2023)

“Kami dari kader posyandu semaksimal mungkin memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan selalu mengajak para orang tua di Desa Nglebak untuk selalu ikut serta dalam kegiatan posyandu karena kegiatan ini merupakan hak mereka untuk

mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kami juga tidak membatasi anak laki-laki harus berapa dan anak perempuan harus berapa, semua kami layani karena memang seperti itu protokolnya. Sehingga kami harap semua anak balita mendapatkan manfaat yang sama atas program posyandu ini”. (Wawancara Galuh Yuliyanti, kader posyandu/ 7 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam penyelenggaraan posyandu memenuhi kriteria untuk pengarusutamaan gender. Anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan peluang yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama. Tidak terdapat batasan jumlah partisipasi antara anak laki-laki dan perempuan serta pelayanan dari kader posyandu yang sama membuktikan bahwa aspek kontrol dan manfaat sudah memenuhi kriteria kesetaraan gender.

Penyelenggaraan Bina Keluarga Bersama (BKB) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan SDM bagi Ibu/Anak keluarga yang mempunyai Anak Balita Posyandu Desa Nglebak mengadakan Bina Keluarga Balita agar seorang ibu dapat mengasuh Anak dengan baik dan benar serta melatih anak untuk bersosialisasi dengan keluarga serta lingkungan terdekat. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan sekali secara rutin bertempat di Balai Desa Nglebak. Keluarga Balita yang ada di Desa Nglebak mendapatkan pembinaan yang sama di untuk setiap dusun. Selain mendapatkan pembinaan oleh kader posyandu anak-anak dan balita mendapatkan makanan tambahan gizi sehingga dapat menambah berat badan anak dan kesehatan anak. Untuk aspek akses masyarakat mengaku bahwa dalam pelaksanaannya tidak terdapat batasan antara anak laki-laki dan perempuan. Mereka mendapatkan peluang yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembinaan jika hadir pada saat kegiatan Bina Keluarga Bersama.

Dari ketiga program dibidang kesehatan ini, Suparti mengaku hanya terjadi hambatan saat melaksanakan program KB. Program KB yang telah dicanangkan memang sudah disepakati oleh semua pihak termasuk dengan masyarakat.

Namun, partisipasi masyarakat masih kurang terutama pada partisipasi laki-laki. Bahkan saat sosialisasi pun hanya sedikit laki-laki yang berpartisipasi. Maka dari itu, Suparti bekerja sama dengan Kepala Dusun, Kepala RW, bahkan dengan beberapa Kepala RT dimana di RT atau RW tersebut partisipasinya masih kurang. Suparti meminta bantuan kepada pihak-pihak diatas agar masyarakat dapat bekerja sama dalam program KB ini.

“ Masih banyak masyarakat di Dukuh Gondang itu partisipasinya kurang saat penyelenggaraan program KB. Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat Dukuh Gondang memiliki prinsip banyak anak banyak rezeki. Dengan adanya prinsip tersebut, kami dari pihak pemerintah desa tidak dapat mengusik prinsip tersebut. Lalu yang kami lakukan adalah sosialisasi untuk pendidikan anak didalam rumah tangga. Kami memutar otak untuk mendapatkan ide tersebut, hanya karena ingin partisipasinya meningkat. Untuk ide itu, saya berkonsultasi dengan pendamping desa. Membujuk masyarakat Dukuh Gondang itu cukup sulit karena adanya kepercayaan tersebut, maka kami meminta bantuan kepada masing-masing kepala RT atau RW agar dapat merayu masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB.” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 21 Februari 2023)

Dengan diadakannya program posyandu dan bina keluarga bersama ini, jumlah ibu hamil beresiko tinggi di Kecamatan Tawangmangu mengalami penurunan. Lebih lengkap dijelaskan pada tabel.

Tabel 15. Jumlah Ibu Hamil Beresiko Tinggi per Desa/Kelurahan Tahun 2021

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Ibu Hamil Beresiko Tinggi
1.	Bandardawung	17

2.	Sepanjang	12
3.	Tawangmangu	10
4.	Kalisoro	13
5.	Blumbang	15
6.	Gondosuli	11
7.	Tengklik	9
8.	Nglebak	18
9.	Karanglo	10
10.	Plumbon	9

(Sumber: Kecamatan Tawangmangu 2023)

Tabel 16. Jumlah Ibu Hamil Beresiko Tinggi per Desa/Kelurahan Tahun 2021

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Ibu Hamil Beresiko Tinggi
1.	Bandardawung	10
2.	Sepanjang	12
3.	Tawangmangu	10
4.	Kalisoro	10
5.	Blumbang	11
6.	Gondosuli	9
7.	Tengklik	6
8.	Nglebak	9
9.	Karanglo	10
10.	Plumbon	4

(Sumber: Kecamatan Tawangmangu 2023)

Dari data tabel diatas, ditemukan bahwa terdapat penurunan jumlah ibu hamil beresiko tinggi yang ada di desa Nglebak. Pada tahun 2019 jumlah ibu hamil

beresiko tinggi terdapat 18 jiwa. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami penurunan dan hanya terdapat 9 jiwa.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Desa Nglebak memiliki program pembangunan Umbul udal-udalan yang pada tahun 2023 ini pengerjaannya sudah selesai. Program pembangunan Umbul Udal-Udalan ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat Desa Nglebak. Maka dari itu, Umbul Udal-Udalan merupakan tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes dan menjadi salah satu mata pencaharian baru masyarakat Desa Nglebak. Pada RPJMDes tertera bahwa pengembangan pariwisata tingkat desa ini memiliki dana sebesar Rp. 500.000.000 yang bersumber dari dana desa. Sejauh ini pengelolaannya cukup baik dan sudah memikat wisatawan dari luar Tawangmangu. Warga Desa Nglebak pun berpartisipasi untuk meramaikan tempat wisata tersebut dengan mempromosikan melalui media sosial.

Gambar 9. Umbul Udal-udalan



(Sumber : Profil Desa Nglebak Tahun 2023)

Kemudian dalam analisis gender, aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang ada pada Umbul Udal-udalan ini memenuhi kriteria kesetaraan gender. Seperti dilengkapi dengan toilet perempuan dan laki-laki secara terpisah,

akses jalan yang mudah dilalui oleh laki-laki maupun perempuan, dan penyediaan baju renang laki-laki dan perempuan. Namun di Umbul Udal-udalan sama sekali tidak memiliki wahana perosotan seperti pada wawancara.

“Umbul ini memang dibangun dengan konsep natural mbak, tidak dibangun wahana seperti perosotan itu bukan karena tidak ada dana. Namun memang kesepakatan bersama saat rapat Musyawarah Desa. Sudah disepakati bahwa memang perosotan tidak akan dibangun di Umbul Udal-udalan. Alhamdulillah walaupun tidak ada wahana sama sekali, dengan keberadaan wahana umbul ini sudah diminati warga lokal maupun luar Tawangmangu. Mungkin karena pemamndangannya Gunung Lawu, jadi lebih menikmati pemandangan alam.” (Wawancara Entik Pujiati, pengelola Umbul Udal-udalan/ 10 Februari 2023).

“Umbul Udal-udalan itu airnya sudah jernih sekali tanpa adanya kaporit, jadi menurut saya walaupun tidak ada wahana umbul ini tetap menarik. Suasana asri Tawangmangu dan pemandangan Gunung Lawu sudah cukup memikat untuk datang ke Umbul Udal-udalan ditambah harga masuknya hanya Rp. 5000.” (Wawancara Fandi, pengunjung umbul udal-udalan/ 10 Februari)

Kemudian pada pemberdayaan perempuan melalui PKK. Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK yang dilaksanakan di Desa Nglebak yaitu melalui pelatihan dan pendampingan produksi. Program pemberdayaan ini mempunyai tiga program yaitu pemberian motivasi berwirausaha, pelatihan analisis usaha produk makanan ringan dan pembuatan produk dan pemasaran. Program pemberian motivasi ibu-ibu PKK di Desa Nglebak dari sesi psikologi bertujuan memberikan dorongan dari dalam diri untuk memiliki cara berpikir dan bertindak sebagai seorang wirausahawan. Sesi ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Kegiatan pelatihan analisis usaha, para peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Usaha yang diusulkan untuk dikembangkan adalah usaha pembuatan produk makanan ringan.

Makanan ringan dibuat dengan bahan dasar yang mudah didapatkan di wilayah Desa Nglebak seperti singkong dan ubi-ubian. Selanjutnya, peserta dilatih

melakukan analisis usaha sehingga bisa memperkirakan hasil yang diperoleh termasuk juga mengantisipasi adanya kerugian dalam usaha. Sesudah melakukan pelatihan, peserta minta untuk mulai melakukan pembuatan produk secara berkelompok di wilayah masing-masing. Pada akhirnya, produk yang sudah selesai dibuat dipasarkan di area wisata Tawangmangu. Sampai saat ini, pelatihan pembuatan makanan ringan disosialisasikan pada saat pertemuan RT, sehingga semua masyarakat mendapatkan pelatihan yang sama dan tidak terkhusus pada Ibu-Ibu PKK saja.

“Saya berharap dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan tersebut dapat menjadi income baru untuk para ibu-ibu bahkan untuk masyarakat Desa Nglebak karena sekarang ini sosialisasi pelatihan tidak hanya terkhusus untuk ibu-ibu PKK saja tetapi untuk umum.” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

“Dengan adanya pelatihan tersebut saya sekarang dapat membuka usaha untuk pembuatan snak seperti arem-arem, kripik sngkng dan tela-tela serta sosis isian. Daripada dirumah menganggur, jadi saya memanfaatkan pelatihan terse ut untuk membuka usaha tersebut.” (Wawancara Darmi, warga biasa/ 20 Februari 2023)

“Pelatihan tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Pelatihnya pun juga memberikan informasi dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, sehingga hampir semua ibu-ibu yang mengikuti pelatihan tersebut mendapatkan manfaatnya.” (Wawancara Endang, warga biasa/ 20 februari 2023)

Program pemberdayaan ibu-ibu PKK Desa Nglebak menunjukkan pengaruh yang positif. Hal ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, sebagian besar peserta yakni menunjukkan motivasi berwirausaha yang tinggi setelah pelatihan. Hal kedua yang menunjukkan pengaruh positif dari program pelatihan pemberdayaan ibu-ibu PKK Desa Nglebak adalah berhasil diciptakannya produk-produk kreatif seperti makanan ringan berdasarkan bahan baku yang mudah ditemukan di Desa

Nglebak. Produk tersebut laku untuk dipasarkan di area wisata setempat seperti area wisata umbul Udal-udalan, Grojogan Sewu, dan Sekipan Camping Ground.

Upaya Suparti dalam mendorong terealisasinya program pemberdayaan sedikit terhambat karena adanya pandemic covid-19. Karena terhambat oleh pandemi covid-19, terdapat beberapa program pemberdayaan yang mangkrak seperti pada pengelolaan BUMDes Umbul Udal-udalan. Bahkan pada tahun 2020 pembangunan Umbul Udal-udalan pernah berhenti sementara waktu karena harus memfokuskan anggaran pada penanganan covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber.

“Kami pada tahun 2020 itu seperti diberi surprise karena pada awal tahun ini sudah menata wacana akan membuka Umbul Udal-udalan. Namun, ternyata pada bulan Maret pandemi covid-19 menghampiri hampir seluruh pelosok negeri. Karena itu, maka ada beberapa kegiatan yang terhenti, dari mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, hingga yang sudah matang direncanakan yaitu pembangunan BUMDes Udal-udalan. Wah saat itu saya berpikir, bisa jalan tidak ya program ini, karena pada saat itu saya sudah berjanji pada warga untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Desa Nglebak dan menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Nglebak. Dulu itu ya namanya juga musibah ya, tidak ada yang tahu munculnya kapan dan berakhirnya kapan. Berangkat dari janji tersebut, saya tetap melanjutkan sedikit demi sedikit pembangunan untuk BUMDes Umbul udal-udalan. Meskipun pembangunannya sempat berhenti beberapa saat mungkin sekitar empat sampai lima bulan, kami pemerintah desa tetap berusaha untuk melanjutkan pembangunan BUMDes tersebut dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak melanggar ketentuan pemerintah untuk isolasi kesehatan mandiri dirumah masing-masing.” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

BAB VI

EVALUASI PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DESA NGLEBAK

Bagian ini menguarikan sejauhmana Suparti mengevaluasi terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Mengingat pada setiap pembangunan yang dilaksanakan seharusnya melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Dalam bab ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana Suparti mengevaluasi program pembangunan dalam periode tahunan. Dalam Bab ini peneliti menggambarkan tiga unsur evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa menurut Sahroni (2004) yaitu input, proses, dan output. Data yang diperoleh berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan pihak aparat terkait, serta masyarakat Desa Nglebak dan juga berdasarkan sumber literatur yang sesuai sehingga menunjang penelitian ini.

A. Perencanaan Kebijakan Yang Responsif Gender

Dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, input dalam konteks ini yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa, Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam maupun tuntutan dan dukungan dari masyarakat di Desa Nglebak. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Nglebak dimulai dari pembentukan RPJM Desa dimana RPJM Desa memuat rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka enam tahun. Kemudian, dibuat kembali RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Berdasarkan usulan dalam RKP Desa Nglebak, kegiatan tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat total 45 usulan kegiatan. namun, karena hanya sebatas usulan perencanaan maka tentunya tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Hanya yang paling dibutuhkan dan yang paling penting yang akan diprioritaskan. Usulan yang diserap dalam proses perencanaan ini merupakan usulan dari masyarakat desa. menyebutkan perempuan dalam peserta musrenbang. Perempuan di Desa Nglebak memang sering dilibatkan dalam musrenbang desa. Di Desa Nglebak beranggapan bahwa perempuan perlu terlibat dalam pengambilan keputusan. Pada forum diskusi PKK pertemuan rutin diselenggarakan tiap satu bulan sekali dengan cara

yang bergilir tiap dusun. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan menyatukan kepentingan perempuan tiap dusun. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti pengajian dan arisan difasilitasi oleh PKK. Hal ini sudah menjadi keputusan bersama.

Maka dalam input pada perencanaan pembangunan yang berupa RKP Desa memuat prinsip pengarusutamaan gender karena dalam perencanaan, perempuan ikut berpartisipasi. Perempuan di Desa Nglebak memiliki hak untuk berpendapat dan menyalurkan usulan untuk rencana kerja atau program pembangunan selanjutnya. Dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) usulan kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 hanya terdapat 9 kegiatan, 2021 hanya terdapat 10 kegiatan dan pada tahun 2022 hanya terdapat 14 kegiatan. Hal tersebut dikarenakan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan ditambah dengan hambatan saat pandemi covid-19.

B. Pelaksanaan Kebijakan Yang Responsif Gender

Proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk dikembangkan. Dalam konteks ini peneliti mengkaji proses pembangunan dibawah kepemimpinan Suparti yang telah berjalan selama dua setengah tahun. Pada tahun 2020, Desa Nglebak mendapatkan dana desa sebesar Rp. 960.200.000. Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2020, penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk bidang pembangunan desa dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 840.111.250. Penggunaan paling besar dalam bidang pembangunan desa yang dilakukan tahun 2020 yang memanfaatkan dana desa adalah pembangunan jalan dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Suparti mengaku bahwa mulai pada bulan April tahun 2020, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sedikit terhambat karena adanya pandemi covid-19. Sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tertunda dan anggaran yang dialihkan untuk penanganan saat pandemi

covid-19 sampai pada saat kebijakan PSBB sedikit memiliki kelonggaran yaitu pada bulan September tahun 2020.

Perangkat desa sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 demi mewujudkan sebuah langkah preventif dan kuratif, juga dengan mengoptimalkan peran relawan desa dalam sisi edukasi dan monitoring. Beberapa perangkat desa memandang kebijakan ini memberatkan desa karena desa harus mengarahkan kembali beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian perangkat desa yang lain mendukung kebijakan ini karena dirasa sudah tepat untuk menangani dampak pandemi yang telah menyebar ke desa mereka. Suparti menjelaskan bahwa pada tahun 2020, pembangunan infrastruktur berjalan hampir 70% dari yang diwacanakan. Hanya saja karena terhambat oleh pandemi covid-19, terdapat beberapa program pemberdayaan yang mangkrak seperti pada pengelolaan BUMDes Umbul Udal-udalan. Bahkan pada tahun 2020 pembangunan Umbul Udal-udalan pernah berhenti sementara waktu karena harus memfokuskan anggaran pada penanganan covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber.

“Ternyata pada bulan Maret pandemi covid-19 menghampiri hampir seluruh pelosok negeri. Karena itu, maka ada beberapa kegiatan yang terhenti, dari mulai pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, hingga yang sudah matang direncanakan yaitu pembangunan BUMDes Udal-udalan. Wah saat itu saya berpikir, bisa jalan tidak ya program ini, karena pada saat itu saya sudah berjanji pada warga untuk membuka lapangan pekerjaan baru di Desa Nglebak dan menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Nglebak. Dulu itu ya namanya juga musibah ya, tidak ada yang tahu munculnya kapan dan berakhirnya kapan. Berangkat dari janji tersebut, saya tetap melanjutkan sedikit demi sedikit pembangunan untuk BUMDes Umbul udal-udalan. Meskipun pembangunannya sempat berhenti beberapa saat mungkin sekitar empat bulan, kami pemerintah desa tetap berusaha untuk melanjutkan pembangunan BUMDes tersebut dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak melanggar ketetapan pemerintah untuk isolasi kesehatan mandiri

dirumah masing-masing.” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

“Pada awal tahun memang Ibu (Suparti) sedang gencar-gencarnya membangun BUMDes Umbul udal-udalan. Bahkan pada saat itu masyarakat excited dan ikut melancarkan pembangunan BUMDes tersebut. Namun tiba-tiba pada saat covid-19 muncul, pembangunan BUMDes seperti langsung terhenti. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat pembangunan sedikit demi sedikit yang dijalankan, namun pembangunan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat. Pada tahun 2020 ini banyak warga yang tumbang entah itu sakit atau meninggal dunia, maka pembangunan sempat terhenti dan memfokuskan pada penanganan kesehatan. Karena banyaknya korban yang tumbang pada saat pandemi covid-19 ini, warga Desa Nglebak menjadi khawatir untuk sekedar keluar dari rumah, pada saat itu suasana Desa Nglebak langsung sepi seklai. Seperti tidak ada kehidupan.” (Wawancara Miyati, warga biasa/ 20 Februari 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan BUMDes terhenti karena pandemi covid-19. Disamping karena anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid-19, partisipasi masyarakat juga menurun dikarenakan kekhawatiran pemerintah desa serta masyarakat karena banyaknya korban yang disebabkan oleh virus covid-19. Namun, pemerintah desa tidak langsung menghentikan pembangunan namun bergerak dengan langkah kecil untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.

Selanjutnya pada tahun 2021, Suparti mengaku karena evaluasi pada tahun 2020 menitikberatkan pada berhentinya pembangunan dan pengelolaan BUMDes. Maka, pada tahun 2021 Suparti gencar dan memiliki ambisi untuk segera menyelesaikan proyek yang mangkrak tersebut. Sehingga pembangunan Umbul Udal-udalan dapat rampung pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Desa Nglebak memperoleh dana desa sebesar Rp. 1.010.117.000, berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2021 penggunaan dana desa lebih banyak digunakan

untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 940.171.250. Penggunaan paling besar dalam bidang pembangunan desa yang dilakukan tahun 2021 dengan memanfaatkan dana desa adalah pembangunan Umbul udal-udalan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain berfokus pada pembangunan BUMDes tersebut, Suparti memfokuskan pendidikan dan pemberdayaan untuk masyarakat dengan program sedemikian rupa seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga pada tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM dapat berjalan selaras dengan perkembangannya. Ditemukan bahwa evaluasi pada tahun 2021 ini yaitu pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan. Suparti mengaku hambatan tersebut dikarenakan komunikasi dengan masyarakat yang kurang karena saat itu adalah masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Maka, pada saat musyawarah untuk perencanaan, bahkan hingga pada saat pelaksanaan program pembangunan partisipasi masyarakat Desa Nglebak menurun.

“Partisipasi masyarakat pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan, saya pikir itu dikarenakan masyarakat masih khawatir akan dampak yang ditimbulkan dari adanya virus covid-19. Pada tahun 2021 itu kan diberitakan bahwa terdapat gelombang kedua covid-19 menyerang Indonesia, kalau tidak salah itu namanya varian Delta. Dengan pemberitaan tersebut, maka sebagian masyarakat Desa Nglebak tentu khawatir untuk beraktifitas seperti sebelum virus covid-19. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang tidak terlalu mepermasalahkan penyebaran virus covid-19 yang kemudian masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.”
(Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

“Pada tahun 2021 itu tidak terlalu banyak masyarakat yang meninggal dikarenakan covid-19, masih lebih parah pada tahun 2020. Namun demikian, masyarakat masih khawatir untuk beraktivitas diluar ruangan. Tentu saja karena berita-berita di berbagai daerah yang disebarakan melalui media

sosial. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih untuk tetap dirumah daripada untuk sekedar menghadiri rapat atau musyawarah desa.” (Wawancara Galih, warga biasa/ 20 Februari 2023)

Dikarenakan pada tahun 2021 partisipasi masyarakat menjadi sorotan pada saat evaluasi. Maka pada tahun 2022, Suparti memiliki tujuan untuk meningkatkan kembali partisipasi masyarakat Desa Nglebak. Pada tahun 2022 Desa Nglebak memperoleh dana desa sebesar Rp. 1.104.227.000, berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2022 penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 990.171.250. Penggunaan paling besar dalam bidang pembangunan desa yang dilakukan tahun 2022 dengan memanfaatkan dana desa adalah pembangunan Umbul udal-udalan dan pemberdayaan masyarakat. kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglebak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tahun 2022 di desanya, sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglebak selain dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan dan musyawarah (rembug desa) juga dilakukan pada saat Kepala Desa Nglebak melakukan kunjungan ke wilayah lingkungan RT/RW.

Dari pelaksanaan proses pembangunan Desa Nglebak dibawah kepemimpinan Suparti yang sudah menjabat selama dua setengah tahun ini dapat disimpulkan bahwa meskipun telaah mengenai program pembangunan banyak menemukan kelemahan-kelemahan, namun harus diakui juga bahwa banyak program pembangunan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Suparti berusaha untuk memasukan peran perempuan dalam pembangunan dan memasukkan kebutuhan anak-anak Desa Nglebak dalam prioritas pembangunan seperti yang sudah dijelaskan pada Bab lima. Kendala yang terjadi dalam

pelaksanaan program pembangunan salah satunya berasal dari merebaknya pandemi covid-19.

C. Keluaran Kebijakan Yang Responsif Gender

Output adalah keluaran dari suatu sistem kebijakan. Kebijakan disini adalah kebijakan program pembangunan Desa Nglebak. Terdapat beberapa program yang telah dinikmati oleh masyarakat baik anak-anak, laki-laki, dan perempuan, seperti penerangan jalan, talud yang telah dibangun sehingga tidak menimbulkan banjir, dan jalan yang sudah nyaman untuk dilewati, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan-kekurangan tetapi pemerintah desa tetap melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa kemudian terdapat juga pembangunan bidang pemberdayaan seperti pengembangan umbul udal-udalan yang juga telah selesai pembangunannya dan telah dinikmati oleh masyarakat Desa Nglebak.

Evaluasi output yang dilakukan oleh Suparti dalam menilai suatu program pembangunan dilakukan secara *general* dan menitikberatkan pada efektifitas dan partisipasi masyarakat. Karena tolok ukur Suparti dalam mengevaluasi hanya sebatas efektifitas dan partisipasi, masih terdapat beberapa pembangunan yang tidak merata. Suparti mengevaluasi suatu program hanya dengan patokan dana desa. Menurutnya, tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian harapan suatu tujuan kebijakan publik.

“Dalam mengevaluasi pembangunan yang sudah dicanangkan saya lebih memilih untuk menilai secara general. Karena aspek pengarusutamaan gender sudah saya masukkan dalam pelaksanaan pembangunan. Lalu untuk bentuk pertanggung jawaban itu setelah kami melakukan proses dan deketapannya melalui rapat di desa dan menyampaikan bahwa dari sekian banyak program tersebut berjalan dan kekurangan atau hambatan yang ada juga kami sampaikan. Untuk penggunaan anggaran, terserap semua atau masih ada sisa juga kami sampaikan melalui rapat dan melalui BPD. Yang sangat saya sayangkan

itu terkadang ada aparat desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, padahal sudah diwanti-wanti agar tepat waktu untuk menyampaikan.” (Wawancara Suparti, Kepala Desa/ 10 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara diatas pada laporan pertanggungjawaban peneliti melihat bahwa laporan rutin yang dilakukan setiap satu tahun anggaran berjalan dengan baik. Bentuk pertanggung jawabannya setelah pemerintah desa melakukan proses dan penetapan melalui rapat desa dan menyampaikan bahwa dari sekian banyak program yang berjalan dan kekurangan atau hambatan yang ada juga disampaikan dengan penggunaan anggaran apakah sudah terserap atau masih terdapat sisa. Hal tersebut disampaikan pada saat rapat den juga melalui BPD. Laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Nglebak sudah berjalan baik, hanya saja kurang terdapat pada kedisiplinan aparatatur desa.

BAB VII

PENUTUP

Pada bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian disajikan di bab-bab sebelumnya. Kemudian peneliti juga akan memberikan saran yang diajukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dan memahami inti pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang penulis lakukan tentang program pengarusutamaan gender yang dijalankan oleh Suparti sebagai Kepala Desa Nglebak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pembangunan yang ditetapkan oleh Suparti cukup *general* seperti pembangunan desa pada umumnya yaitu terdapat pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan dan perbaikan jalan desa, pemeliharaan prasarana jalan desa yang meliputi gorong-gorong atau selokan atau parit atau drainase, kemudian pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan balai desa, pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa, dan yang terakhir pembangunan talud desa. Sedangkan untuk pembangunan non-fisik yang ditetapkan oleh Suparti selama kepemimpinannya menjadi Kepala Desa Nglebak antara lain pembangunan bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan TK/PAUD dan operasionalnya. Di Desa Nglebak program dibidang kesehatan terdiri dari tiga program, yaitu penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu, pengasuhan bersama/ bina keluarga bersama yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian, pada bidang pemberdayaan yang termuat dalam RPJMDes dan telah ditetapkan oleh Suparti adalah pembangunan dan pengembangan Umbul Udal-udalan menjadi salah satu program pembangunan utama untuk meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, program pemberdayaan yang ada di Desa Nglebak yaitu pemberdayaan perempuan melalui PKK dan pemberdayaan pemuda melalui kesenian dan olahraga.

2. Pada pelaksanaan program-program pembangunan, Suparti berusaha semaksimal mungkin menerapkan prinsip pengarusutamaan gender. Sebagian besar program pembangunannya dapat memenuhi kriteria kesetaraan gender. Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur. Proses perencanaan pembangunan melibatkan perempuan. Kemudian, dalam melaksanakan pembangunan menimbang apakah pembangunan infrastruktur ini ramah terhadap laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Contoh lainnya pada saat pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, indikator pengarusutamaan gender seperti akses, partisipasi, kontrol dan manfaat memenuhi kriteria untuk kesetaraan gender. Pasalnya tidak terdapat pembatasan kuota antara laki-laki dan perempuan serta semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dengan adanya program bidang kesehatan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Pengarusutamaan gender yang termuat pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mana dijelaskan bahwa suatu pembangunan dapat dikatakan responsive gender jika memenuhi empat indikator kesetaraan gender yaitu aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
3. Evaluasi yang dilakukan oleh Suparti tidak memandang warna antara laki-laki dan perempuan. Suparti memilih menilai suatu program pembangunan secara *general* dan menitikberatkan pada efektifitas dan partisipasi masyarakat. Karena tolok ukur Suparti dalam mengevaluasi hanya sebatas efektifitas dan partisipasi, masih terdapat beberapa pembangunan yang tidak merata. Suparti mengevaluasi suatu program hanya dengan patokan dana desa. Contohnya, pada tahun 2022 Desa Nglebak memperoleh dana desa sebesar Rp.

1.104.227.000, berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2021 penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 990.171.250. Disebutkan bahwa penggunaan paling besar dalam bidang pembangunan desa yang dilakukan tahun 2022 dengan memanfaatkan dana desa adalah pembangunan Umbul udal-udalan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh Suparti hanya sebatas penilaian efektivitas dan partisipasi, tidak menitik beratkan pada indikator pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Maka dapat dikatakan indikator pengarusutamaan gender yang diterapkan oleh Suparti belum memasuki ranah evaluasi, hanya sebatas pada saat perencanaan dan pelaksanaan saja.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan keberhasilan Suparti sebagai Kepala Desa memasukkan setiap indikator kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat dijadikan semangat dan pembelajaran bagi para kandidat Kepala Desa lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di tingkat desa.
2. Untuk evaluasi sebaiknya Suparti sebagai Kepala Desa memilih jalan untuk menilai suatu program pembangunan tidak hanya berdasarkan efektivitas penggunaan dana dan partisipasi masyarakat saja. Namun lebih mendetail, seperti efisiensi pembangunan, responsivitas masyarakat, dan aspek pemerataan pembangunan. Jika hanya berfokus pada efektivitas dan partisipasi saja, dapat membuka celah bahwa pembangunan desa tidak merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeela, A., & K, S. (2016). Impact Of Maternaal Socio Economic Determinants On Early Childhood Stunting In Maldives: An Analysis Of MALdives Demographic Health Survey. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 5:190-200.
- Adliima, H. T. (2021). Perempuan Dan Politik Elektoral (Studi Strategi Balqis Diab Dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020). *UIN Walisongo Semarang*, 1-170.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Riz Media.
- Alfian, M. A. (2018). *Wawasan Kepemimpinan Politik*. Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 135-151.
- Bramantyo, R. Y., & Windradi, F. (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pemangunan Desa. *Jurnal Transparansi Hukum*, 152-168.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cruz, L., Azpeiti, G., Suarez, D., Rodriquez, A., Ferrer, J., & Serra, M. (2017). Factors Associated with Stunting among Children Aged 0 to 59 Month from the Central Region of Mozambique. *Nutriens Journal*, 1-16.
- Djaenuri, A. (2015). *Kepemimpinan, Etika, Dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Ekayanti, N. W., & Suryani, P. (2019). Edukasi Gizi pada Ibu Hamil Mencegah Stunting pada Kelas Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan*, 312.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriyah, N. (2012). Quo Vadis Pengarusutamaan Gender: Representasi Kebijakan Pemerintah dan Realitas Sosial Masyarakat Banten . *Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta* (pp. 97-133). Banten: Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta.
- Hardiman, F. B. (1993). *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Herawati, S. (2020). PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019). *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1-115.
- Juliati, D. M. (2009). Potret Nyai Salimah Hadi Sebagai Pemimpin Publik Di Madura. In S. H. Sastriyani, *Gender Dan Politik* (p. 378). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khoer, F. I., Gustiawati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 33-51.
- Lexy, J. M. (1991). *metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Marjoko, M. (1999). *Prinsip persamaan Di Hadapan Hukum Bagi Wanita Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Marsh, D., & Stoker, G. (2017). *Teori Dan metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Meier, P., & Lombardo, E. (2013). Gender Quotas, Gender Mainstreamin, and. *Sage Journal:Political Sciences*, 46-62.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ningrum, E. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. *Jurnal Geografi GEA*, Vol. 9, No. 1.
- Novianti, N., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Journal of Public policy and Management Review*, 1-10.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi : pengarus-utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pilaili, M., Pusparini, H., & Nurabiah. (2022). Peranan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Bajur Kecamatan Lajuapi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 132-150.
- Qomariyah, N. (2016). Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Hubungannya Dengan Kesetaraan Gender (Studi Deskriptif di DPRD Provinsi Jawa Barat). *Universitas Padjajaran*, 16-48.
- Rahmatia, V. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dan Dampaknya Terhadap Program Pengarusutamaan Gender Pada Lembaga Koperasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1-134.
- Rahmatunnisa, M., Solihah, R., & Ghufroni, F. (2022). Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Brebes. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 319-330.

- Ramadhan, R., & Ramadhan, N. (2018). Determinasi Penyebab Stunting di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 44-57.
- RI, K. K. (2012). *POSKESDES*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- RI, K. K., & Posyandu, K. K. (2011). *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: Tim UB Press.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2007). *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Murni, S. (2010). *Education Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabariman, H., Kholifah, S., Yuliati, y., & Sobari, W. (2019). Klèbun Babine': Praktik, Gaya Kepemimpinan dan Faktor Pendorong . *Kafa'ah Journal Of Gender Studies*, 225-234.
- Sahroni, dkk. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. GTZ-USAID, Jakarta.
- Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari, E. R. (2021). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2 No 5.
- Saragih, E., Esariti, L., & Wahyono, H. (2021). PENCAPAIAN TUJUAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KAMPUNG SENTRA BANDENG. *Jurnal Pengembangan Kota*, 143-153.
- Shihab, M. Q. (2020). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jogjakarta: Rosdakarya.

- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sulistiyorini. (2010). *Posyandu Dan Desa Siaga*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Suryani, E., Batoebara, M., Aqsho, M., & Hanum, S. (2021). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Masyarakat Desa Bandar Khalipah. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 186-191.
- Suryaningrum, & Muljanah. (2009). Prospek Pengembangan Usaha Pengolahan Pempek. *Squalen*, 31-39.
- Swasono, Y., & Sulistyaningsih, E. (1993). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CV. Izufa Gempita.
- Utaminingsih, A., Sabariman, H., & Riniwati, H. (2020). REPRESENTASI FEMINISME PADA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI MADURA (Studi Keberhasilan Kepala Desa Perempuan Menjadikan Desa Bunder Sebagai Desa Swakarya dan Desa Swasembada). *Kafa'ah Journal Of Gender Studies*, 174-186.
- Veronica, M., Febriani, R. A., & Sari, R. (2020). PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN “KREASI PEMPEK BERBAHAN NASI”. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 11-17.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal Of Anthropology*, 1-14.
- Yogiwati, N., & Aco, F. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. *Jurnal Enersia Publika*, 59-78.
- Yuliana, R. (2009). Muslimah Berpolitik Dalam Prespektif Islam. In S. H. Sastriyani, *Gender And Politics* (p. 390). Yogyakarta: Tiara Wacana.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Desa Nglebak dan Sekertaris Desa Nglebak



Pelaksanaan Musyawarah Desa



Kondisi Topografi Desa Nglebak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Laili Hero Alfauziah
TTL : Karanganyar, 10 November 2001
Alamat : Desa Beji, Rt 02/ Rw 08, Kecamatan
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah
NIM : 1906016091
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.75
Agama : Islam
Email : lailihero10@gmail.com
No. HP : 08988994885

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 04 Tawangmangu (2007-2013)
SMP Negeri 02 Karangpandan (2013-2016)
SMA Negeri Karangpandan (2016-2019)

RIWAYAT ORGANISASI

Anggota KSR UIN Walisongo Semarang (2020-2021)
Anggota PMR SMA Negeri Karangpandan (2016-2019)